

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Master Akuntansi (MAk)  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

Oleh:

**HERI SUSANTO**  
**NPM. 1920050003**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PENGESAHAN TESIS**

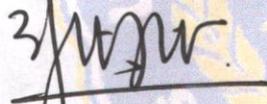
Nama : **HERI SUSANTO**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1920050003**  
Prodi/Konsentrasi : **Magister Akuntansi/ Akuntansi Sektor Publik**  
Judul Tesis : **FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

Pengesahan Tesis

Medan, 14 Oktober 2021

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



**Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.,**

Pembimbing II

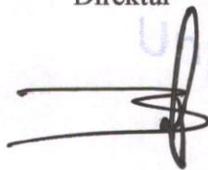


**Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.,**

**Diketahui**

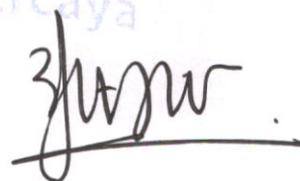
**UMSU**

Direktur



**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**

Ketua Program Studi



**Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.,**

**PENGESAHAN**

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

**HERI SUSANTO**

**1920050003**

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak) Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021

Komisi Penguji

**1. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPAI.,**

Ketua

1.....

**2. Dr. IRFAN, S.E., M.M.**

Sekretaris

2.....

**3. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.,**

Anggota

3.....



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERNYATAAN**

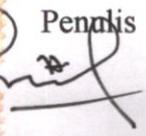
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan / atau doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri , tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata di temukan seluruh atau sebagai tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian – bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 14 Oktober 2021

Penulis

  
  
Heri Susanto  
1920050003

## ABSTRAK

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

**HERI SUSANTO**  
**NPM. 1920050003**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemanfaat Teknologi Informasi (TI) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengelolaan barang milik daerah (BMD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian dilakukan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 (lima puluh empat) SKPD dengan jumlah responden sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) orang. Dengan menggunakan metode purposive sampling, jumlah sampel yang diambil sebanyak 31 (tiga puluh satu) SKPD dengan jumlah responden sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang dan sekaligus dijadikan responden penelitian, yang terdiri dari kasubbag keuangan selaku PPK-SKPD atau pembantu PPK-SKPD, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara, dan Pengurus Barang pada Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS.3 yang dijalankan dengan media komputer. Berdasarkan hasil penelitian penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pengelolaan BMD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata Kunci:** Penerapan SAP, Kualitas SDM, Penerapan SPIP, pemanfaat TI, Pengelolaan BMD, Kualitas Laporan Keuangan

## **ABSTRACT**

### ***FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS TO THE GOVERNMENT LANGKAT DISTRICT***

**HERI SUSANTO**  
**NPM. 1920050003**

The purpose of this study is to test and analyze how much influence the implementation of Government Accounting Standards (SAP) has on the quality of the Langkat Regency Government's financial reports. To test and analyze how much influence the Quality of Human Resources (HR) has on the quality of the financial statements of the Langkat Regency Government. To test and analyze how much influence the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) has on the quality of the Langkat Regency Government's financial reports. To test and analyze how much influence the use of Information Technology (IT) has on the quality of the Langkat District Government's financial reports. To test and analyze how much influence the management of regional property (BMD) has on the quality of the Langkat Regency Government's financial reports. The research approach uses an associative approach. The research was conducted at SKPD in the Langkat Regency Government. The population in this study amounted to 54 (fifty four) SKPD with a total of 167 (one hundred and sixty seven) respondents. By using the purposive sampling method, the number of samples taken was 31 (thirty one) SKPD with a total of 98 (ninety eight) respondents and also used as research respondents, consisting of the head of the financial sub-section as PPK-SKPD or PPK-SKPD assistants, expenditure treasurer or assistant treasurer, and Property Manager at the Service, Agency and Office within the Langkat Regency Government. This research uses data analysis method using SmartPLS.3 software which is run with computer media. Based on the research results, the application of SAP has an effect on the quality of financial reports. The quality of human resources affects the quality of financial reports. The application of SPIP affects the quality of financial reports. The use of IT affects the quality of financial reports. BMD management affects the quality of financial reports.

***Keywords: SAP implementation, HR quality, SPIP implementation, IT utilization, BMD Management, Financial Report quality.***

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'aliakum Wr. Wb**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Langkat”**. Shalawat berangkai salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat penyelesaian Pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Orang tua terhebat (Surli dan Tumiah), istri tercinta Evi Gunawan, S.Pd, terimakasih atas motivasi dan dukungannya, anak-anak tersayang Raisya Dara Artha Susanto, Kenzie Muhammad Akhdan Susanto, dan Dzakira Yasmine Noer Susanto yang menjadi semangat untuk maju terus dan pantang menyerah sehingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis mengalami banyak kendala dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun demikian penulis tetap berupaya agar tesis ini sesuai dengan yang diharapkan, penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, dorongan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak baik sifatnya moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Pembimbing I.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPAI., Bapak Dr. Irfan, S.E., M.M., dan ibu Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji.
6. Bapak dan Ibu dosen atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan, dan seluruh staf administrasi di Pascasarjana Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat kekeluargaan dan kompak selama masa perkuliahan.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa memberkahi, serta semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 14 Oktober 2021  
Penulis

*Heri Susanto*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	15
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori Keagenan (Agency Theory).....	18
2. Kualitas Laporan Keuangan .....	19
2.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan .....	19
2.2. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan .....	20
2.2.1. Peranan Laporan Keuangan.....	20
2.2.2. Tujuan Pelaporan Keuangan.....	22
2.3. Komponen Laporan Keuangan.....	23
2.3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .....	23
2.3.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) .....	24
2.3.3. Laporan Operasional (LO).....	24
2.3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) .....	24
2.3.5. Neraca .....	25
2.3.6. Laporan Arus Kas (LAK) .....	25
2.3.7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLAK) .....	25
2.4. Indikator Kualitas Laporan Keuangan .....	26
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan .....	29
3.1. Penerapan SAP.....	29
3.1.1. Pengertian SAP .....	29
3.1.2. Tujuan dan Manfaat SAP .....	31
3.1.2.1. Tujuan SAP .....	31
3.1.2.1. Manfaat SAP .....	31
3.1.3. Indikator Penerapan SAP .....	32

3.2. Kapasitas SDM .....	33
3.2.1. Pengertian Kapasitas SDM.....	33
3.2.3. Indikator Kapasitas SDM.....	35
3.3. Penerapan SPIP .....	37
3.3.1. Pengertian SPIP .....	37
3.3.2. Tujuan SPIP.....	38
3.3.3. Indikator SPIP .....	39
3.4. Pemanfaatan TI .....	45
3.4.1. Pengertian Pemanfaatan TI .....	45
3.4.2. Tujuan dan Fungsi TI .....	46
3.4.3. Indikator Pemanfaatan TI.....	47
3.5. Pengelolaan BMD .....	48
3.5.1. Pengertian Pengelolaan BMD .....	48
3.5.2. Tujuan Pengelolaan BMD.....	49
3.5.3. Indikator Pengelolaan BMD.....	50
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	55
C. Kerangka Berpikir/Konseptual.....	58
1. Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .....	59
2. Pengaruh Kapasitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .....	60
3. Pengaruh Penerapan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .....	61
4. Pengaruh Penguasaan dan Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	62
5. Pengaruh Pengelolaan BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .....	63
D. Hipotesis.....	65

### **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	66
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	66
C. Populasi dan Sampel .....	67
1. Populasi .....	67
2. Sampel .....	67
D. Definisi Operasional Variabel .....	70
E. Sumber Data.....	74
F. Teknik Pengumpulan Data .....	74
G. Teknik Analisis Data .....	80

<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	89
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	89
2. Tingkat Penyebaran Kuesioner .....	91
3. Demografi Responden .....	92
4. Deskripsi Data Penelitian.....	93
5. Hasil Pengujian SEM PLS .....	110
B. Pembahasan .....	122
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	138
B. Saran .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1.1	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Langkat .....	6
Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu .....	55
Tabel 3.1	Rencana Penelitian .....	66
Tabel 3.2	Populasi dan Sampel .....	68
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel.....	72
Tabel 3.4	Uji Validitas .....	77
Tabel 3.5	Uji Reabilitas.....	80
Tabel 3.6	Kategori Skala .....	81
Tabel 4.1	Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab. Langkat.....	90
Tabel 4.2	Data Distribusi Sample Penelitian.....	92
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	92
Tabel 4.4	Data Responden Berdasarkan Usia .....	93
Tabel 4.5	Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden ...	94
Tabel 4.6	Variabel Kualitas Laporan Keuangan .....	94
Tabel 4.7	Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan .....	97
Tabel 4.8	Variabel Kapasitas sumber daya manusia.....	100
Tabel 4.9	Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	101
Tabel 4.10	Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi/TI.....	104
Tabel 4.11	Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD .....	106
Tabel 4.12	<i>Cross Loading</i> .....	112
Tabel 4.13	<i>Average Varianed Extracted (AVE)</i> .....	114

Tabel 4.14 <i>Composite Reliability</i> .....	114
Tabel 4.15 <i>Cronbach Alpha</i> .....	115
Tabel 4.16 <i>Estimation Weight</i> .....	116
Tabel 4.17 <i>Path Coeficient</i> .....	117
Tabel 4.18 <i>R-Square</i> .....	117
Tabel 4.19 <i>F-Square</i> .....	118
Tabel 4.20 <i>Dirrect Effect</i> .....	119
Tabel 4.21 <i>T-Statistics dan P-Values</i> .....	121

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	64
Gambar 4.1 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS.....	111

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah, kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi, sistem pengendalian intern yang tidak memadai serta buruknya pengelolaan barang milik daerah (BMD), sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan dikarenakan auditor pemerintah mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa akun yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada serta pengelolaan BMD yang tidak baik.

Laporan keuangan menjadi penting karena menggambarkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik, selain itu

juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang mempunyai nilai bagi para pemakai atau pengguna Informasi. Informasi yang jelas serta kongkrit dapat membantu para pemakai atau pengguna Informasi mencapai tujuannya serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pengelolaan Keuangan Daerah secara baik harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel.

*Governmental Accounting Standards Board (1999)* dalam *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2018).

Untuk dapat menjadikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas banyak faktor yang harus diperhatikan diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini SAP, kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan sistem informasi akuntansi yang ada dan digunakan, serta pengelolaan barang milik negara/daerah. Selain itu faktor eksternal juga harus diperhatikan dikarenakan diluar organisasi dan diluar kendali organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan pusat dan daerah, pemerintah mengeluarkan aturan terkait berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah harus menyusun laporan keuangan yang nantinya diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Di dalamnya SAP dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang penyajiannya terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Tujuan dari Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan

ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010).

Menurut PP 71 tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki 4 (empat) karakteristik yakni: (1) Relevan/Relevance, (2) Andal/Realinility, (3) Dapat dibandingkan/Comparability, dan (4) Dapat dipahami/Understandability. Dengan menerapkan kreteria tersebut dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Dan agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu dan lengkap sehingga berguna bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan.

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu: Penyajian Jujur, Dapat Diverifikasi, Netralitas.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Berdasarkan undang-undang 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. BPK melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah pemeriksaan selesai BPK akan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat opini yang diberikan oleh BPK yaitu: (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified Opinion), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (Qualified Opinion), (3) Opini Tidak Wajar/TW (Adversed Opinion), (4) dan Tidak Memberi Pendapat/TMP (Disclaimer Opinion).

Laporan Keuangan Pemerintah dikatakan baik jika setelah di audit oleh BPK memperoleh opini WTP. Opini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam memberikan gambaran terhadap kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah dan juga mencerminkan kepatuhan terhadap tertib administrasi dan tertib asas.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan BPK, untuk Pemda yang memperoleh opini WTP dan WDP memiliki kecenderungan pengendalian intern telah memadai. Sedangkan Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini TW dan TMP dari BPK cenderung memerlukan perbaikan dalam pengendalian intern, khususnya dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih adanya pemda yang memperoleh opini TW dan TMP dari BPK-RI menunjukkan bahwa efektivitas SPIP pada masing-masing pemda belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan antara lain: Pencatatan setiap transaksi tidak/belum dilakukan secara akurat, Laporan keuangan disusun/disajikan tidak sesuai dengan ketentuan, Laporan keuangan terlambat disampaikan, Tidak memadainya Sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang dimiliki, SDM yang ada belum dapat mendukung Sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang dimiliki, Pengelolaan BMD yang belum memadai.

Jika menurut undang-undang 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, kualitas laporan keuangan dikatakan baik jika memperoleh opini WTP, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya baik, hal ini dapat dilihat dari Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemkab. Langkat**

NO.	TAHUN ANGGARAN	OPINI
1	2010	TMP
2	2011	WDP
3	2012	WDP
4	2013	WDP
5	2014	WDP
6	2015	WDP
7	2016	WDP

NO.	TAHUN ANGGARAN	OPINI
8	2017	WDP
9	2018	WDP
10	2019	WTP

Sumber: BPK RI Perwakilan Sumut (2021)

Jika dilihat dari opini BPK Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat belum dapat dikatakan baik, dikarenakan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 opini atas Laporan Keuangan Pemkab Langkat masih WDP dan baru Laporan Keuangan tahun 2019 memperoleh opini WTP. Walaupun telah memperoleh opini WTP kualitas Laporan Keuangan belum dapat dikatakan sepenuhnya baik, hal ini dapat dilihat dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Langkat masih terdapat banyak temuan-temuan baik temuan terkait SPIP maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kualitas laporan keuangan salah satunya dipengaruhi oleh pemahaman tentang peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sangat diperlukan untuk menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel serta pengukuran kinerja yang lebih baik, selain itu juga untuk memfasilitasi manajemen aset agar lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka tindak lanjut penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, Pemkab Langkat telah mengeluarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan penyajian akun pada laporan keuangan Pemkab Langkat dalam hal

ini tidak disajikannya beban persediaan dalam Laporan Operasional (LO) sebagaimana dapat dilihat pada LHP BPK Nomor: 35.B.LHP/XVIII.MDN/05/2016 dan LHP Nomor: 46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2017 yang dinyatakan Pemkab Langkat belum dapat menyajikan beban persediaan sesuai dengan Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Irwan, 2011), dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (Armando, 2013), menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2013) juga menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Peralihan akuntansi pemerintahan dari basis kas ke basis akrual mempunyai pengaruh yang sangat kompleks sehingga diperlukan pemahaman tentang konsep-konsep akuntansi secara utuh. Penerapan basis akuntansi tidak hanya sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyusun/menyajikan laporan keuangan, tetapi yang lebih penting, bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi atas transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), serta bagaimana merancang atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan/keahlian di bidang akuntansi (Halim, 2008). Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas, kemampuan sumber daya manusia untuk menerapkan sistem akuntansi menjadi sangat penting.

Keterbatasan SDM berkualitas dan memahami perubahan peraturan serta menguasai mekanisme penyusunan laporan keuangan menjadi kendala pada Pemkab Langkat. Saat ini ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan Akuntansi hanya sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Selain itu pendistribusian ASN di tiap SKPD belum merata dan tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dalam menduduki jabatan, khususnya untuk jabatan kepala sub bagian keuangan hal ini menjadi penting dikarenakan kasubbag keuangan juga berfungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang mempunyai tugas sebagai penyusun laporan keuangan di SKPD. Dalam LHP BPK Nomor: 83/LHP/XVIII.MDN/10/2015 dinyatakan bahwa Pemkab Langkat belum melakukan analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, asset dan TI dalam rangka implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Ada beberapa penelitian terkait kapasitas SDM diantaranya, (Wansyah, Darwin, & Bakar, 2012) dalam penelitiannya menemukan nilai informasi dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh kapasitas SDM, (Mahaputra, 2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa kapasitas SDM secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Sagara, 2015) menunjukkan bahwa kapasitas SDM secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Salah satu faktor utama agar kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan adalah pengawasan intern. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian

independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Djarwanto, 2011). Tahap pengawasan, seharusnya dapat menjamin semua proses kegiatan di pemerintahan berjalan efisien, efektif serta ekonomis sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengawasan dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Dalam rangka implementasi SPIP sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pemkab Langkat menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Langkat Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemkab Langkat. Setelah terbitnya Perbup tentang SPIP belum pernah dilakukan penilaian terkait implementasi SPIP, baru pada tahun 2018 dilakukan penilaian terkait implementasi SPIP. Berdasarkan hasil penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tertuang dalam surat nomor: SP-851/D3/04/2019 tentang Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2018 dinyatakan bahwa Pemkab Langkat masih pada level 2 (dua) dalam implementasi SPIP. Pada level ini, Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu Pemerintah. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Kepala Daerah menangani kelemahan tidak konsisten. (Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021)

Kualitas SPIP pada pemerintah Kab. Langkat kurang memadai, dapat dilihat pada temuan-temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Langkat oleh BPK diantaranya: Pengelolaan belanja tak terduga dan hibah tidak tertib dalam LHP BPK nomor: 35.B/LHP/XVIII.MDN/05/2016, pengelolaan uang persediaan dan terdapat klasifikasi penganggaran yang tidak tepat dalam LHP BPK nomor: 46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2017, penatausahaan Kas di bendahara pengeluaran belum tertib dalam LHP BPK nomor: 48.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, pengelolaan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyetoran pajak restoran belum tertib dalam LHP BPK nomor: 59.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, dan Klasifikasi penganggaran belanja tidak tepat. Pengelolaan belanja hibah dan belanja bansos tidak memadai terdapat dalam LHP BPK nomor: 56.B/LHP/XVIII.MDN/05/2020

Ada beberapa penelitian terkait sistem pengendalian intern diantaranya penelitian yang dilakukan (Irwan, 2011), dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, (Herawati & Susanto, 2009) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Armando, 2013) juga menemukan bahwa nilai informasi laporan keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh SPIP.

Penggunaan teknologi informasi juga turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian (Yosefrinaldi, 2013) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Teknologi

informasi telah menjadi pilihan utama untuk menciptakan sistem informasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Dengan kemajuan teknologi saat sekarang ini, baik pemerintah pusat maupun daerah sudah meninggalkan sistem manual dan beralih ke sistem yang terkomputerisasi serta memanfaatkan jaringan internet untuk menghubungkan antar SKPD maupun dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian/lembaga.

Pemkab Langkat telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangannya dalam hal ini menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kabupaten Langkat. Aplikasi ini telah terintegrasi ke setiap SKPD, yang menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi ini antara lain terkait dengan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak, serta SDM yang dimiliki, terutama jaringan internet yang belum terhubung ke semua SKPD terutama untuk sebahagian Kecamatan.

Berdasarkan LHP BPK Nomor: 83/LHP/XVIII.MDN/05/2015, LHP BPK-RI Nomor: 35.B.LHP/XVIII.MDN/05/2016 dan LHP Nomor: 46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2017 yang dinyatakan bahwa Aplikasi yang ada pada Pemkab Langkat belum dapat menyajikan beban persediaan sesuai dengan Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan (Aryani, 2013) menemukan bahwa selain penerapann SAP, SDM, dan SPI, teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian Setiawati dan (Sari, Martani, & Setyaningrum, 2015) juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Sukmaningrum, 2012) turut menguatkan bahwa pemanfaatan TI memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu ada satu faktor yang tidak kalah pentingnya agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Menurut PP 27 tahun 2014, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian.

Permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah belum diterapkannya secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada proses perencanaan penganggaran pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, kemudian pemerintah daerah tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang menambah harga perolehan aset tetap. Barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih oleh pihak lain, bahkan aset tetap/BMD tidak dapat ditelusuri keberadaannya serta kehilangan aset tetap tidak terdeteksi. Barang yang tidak dikembalikan ke SKPD oleh pejabat yang telah pensiun, dan ada juga aset warisan daerah Kabupaten induk yang diserahkan kepada daerah yang dimekarkan tidak didukung dengan rincian data yang informatif dan tidak disertai bukti kepemilikan (Halim, 2008).

Lemahnya pengelolaan BMD pada Pemkab Langkat dapat dilihat dari LHP BPK yang masih terdapat temuan terkait penatausahaan persediaan dan pengelolaan BMD dengan rincian sebagai berikut: masih terdapat aset yang bernilai Rp0,00 s/d Rp100,00, terdapat aset tetap belum dilengkapi bukti kepemilikan, terdapat indikasi aset tetap yang belum tercatat, terdapat indikasi aset tetap yang tercatat dua kali dan terdapat aset yang tidak dikapitalisasi ke aset induk. Masalah-masalah tersebut dapat dilihat dalam LHP BPK nomor: 46.B/LHP/XVIII/.MDN/05/2017, LHP BPK nomor: 48.B/LHP/XVIII/.MDN/05/2018, LHP BPK nomor: 59.B/LHP/XVIII/.MDN/05/2019, dan LHP BPK nomor: 56.B/LHP/XVIII/.MDN/06/2020.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoirul Syahputra, Yusman Syaukat dan Abdul Kohar (Irwan, 2011), dalam penelitiannya menemukan bahwa lemahnya pengelolaan BMD mempengaruhi kualitas laporan keuangan, penelitian yang dilakukan (Syarifudin, 2014) menemukan bahwa penerapan Sistem Informasi dalam pengelolaan BMN berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Silviana, 2012) menemukan bahwa lemahnya pengelolaan BMD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Langkat, peneliti berkeinginan meneliti tentang **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat”**

## **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang diuraikan di atas, beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Langkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masih WDP, serta temuan pemeriksaan bersifat material dan selalu berulang di tahun berikutnya.
2. Dalam LHP BPK dinyatakan bahwa Pemkab Langkat belum dapat menyajikan beban persediaan sesuai dengan Lampiran 1 (satu) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis AkruaI.
3. Dalam LHP BPK dinyatakan bahwa Pemkab Langkat belum melakukan analisis kebutuhan SDM terkait pengelolaan keuangan, terutama untuk kasubbag keuangan sebagai PPK SKPD yang mempunyai tugas menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD.
4. SPIP pada Pemkab Langkat masih pada Level 2 (dua), hal ini dapat dilihat dari LHP BPK dimana terdapat banyak temuan terkait SPIP dan temuan tersebut berulang di tahun berikutnya.
5. Dalam LHP BPK dinyatakan bahwa belum sepenuhnya aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan sesuai Lampiran 1 (satu) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis AkruaI. Selain itu Penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai serta belum terintegrasi dengan semua SKPD karena terkendala jaringan internet.

6. Dalam LHP BPK banyak terdapat temuan terkait dengan pengelolaan persediaan dan BMD antara lain penatausahaan persediaan tidak memadai, BMD belum sesuai kondisi sebenarnya dan pengamanan BMD yang tidak memadai.

**C. Rumusan masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;
2. Apakah ada pengaruh SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;
3. Apakah ada pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;
4. Apakah ada pengaruh pemanfaat TI terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;
5. Apakah ada pengaruh pengelolaan BMD terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;
2. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;

3. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;
4. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;
5. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat;

**E. Manfaat Penelitian**

1. Peneliti:

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan;

2. Pemerintah Kabupaten Langkat;

Dijadikan masukan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga dapat terus memperoleh dan mempertahankan Opini WTP yang telah dicapai;

3. Akademisi;

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan atau memperkaya hasil penelitian serta sebagai referensi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan (Agency Theory)**

*Agency Theory* atau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan keuangan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan atau organisasi secara keseluruhan saat ini maupun dimasa yang akan datang jika dibandingkan dengan principal. (Nunnally, 1978) menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut. “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decisionmaking authority to the agent*”. Artinya, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah merupakan agen, yang berkewajiban menyusun/menyajikan informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan bagi semua stakeholder/pengguna informasi keuangan pemerintah yang merupakan prinsipal dalam menilai akuntabilitas serta membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Halim, & Syukri, 2006 menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Hubungan keagenan dalam pemerintahan demokrasi adalah hubungan pendelegasian kewenangan dari masyarakat kepada

wakilnya di parlemen, dari parlemen ke pemerintah, dari pemerintah kepada para menteri dan dari pemerintah kepada birokrasi.

Fadzil, Faudziah, & Nyoto, 2011 juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertindak sebagai principal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen karena pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah selaku agen memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan keuangan.

## **2. Kualitas Laporan Keuangan**

### **2.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam KBBI kualitas didefinisikan sebagai berikut: (a) tingkat baik buruknya sesuatu, (b) derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya).

Menurut (Tangkilisan, 2010), Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku serta harus memenuhi karakteristik kualitas. Menurut (Bastian, 2006) pengertian Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan

tanggung jawab mengelola organisasi. Laporan keuangan adalah suatu gambaran untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diwajibkan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas”

Yani, 2009 menyatakan bahwa: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Sedangkan (Bastian, 2006) menyatakan bahwa: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan.

### **2.3. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan**

#### **2.3.1. Peranan Pelaporan Keuangan**

Dalam PP 71 tahun 2010 dinyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode

pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan berkewajiban untuk melaporkan berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **2.3.2. Tujuan Pelaporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah tidak disusun dan disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan. Akan tetapi laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan untuk membantu semua kelompok pengguna untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

#### **2.4. Komponen Laporan Keuangan**

Dalam PP 71 tahun 2010 dinyatakan bahwa Entitas pelaporan (SKPKD) merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPKD sebagai entitas pelaporan berdasarkan PP 71 tahun 2010 terdiri dari:

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);**

LRA menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan surplus/defisit-LRA, serta pembiayaan dari entitas pelaporan yang

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi ini berguna bagi para pengguna laporan untuk mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan-LRA, (b) Belanja, (c) Transfer, (d) Surplus/defisit-LRA, (e) Penerimaan pembiayaan, (f) Pengeluaran pembiayaan, (g) Pembiayaan neto, dan (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

## **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);**

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **3. Laporan Operasional (LO);**

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);**

LPE menyajikan informasi terkait kenaikan/penurunan ekuitas tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**5. Neraca;**

Dalam Neraca digambarkan posisi keuangan entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

**6. Laporan Arus Kas (LAK); dan**

LAK memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

**7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).**

CaLK merupakan penjelasan naratif terkait angka-angka yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK. CaLK mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan dan Informasi lainnya yang harus diungkapkan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar.

CaLK bertujuan agar laporan keuangan tidak hanya dapat dipahami oleh pembaca tertentu dan manajemen entitas pelaporan akan tetapi dapat dipahami oleh pembaca secara luas. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang berpotensi menyebabkan kesalahpahaman diantara pembacanya. Dan untuk untuk menghindari kesalahpahaman, atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, maka dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi berdasarkan PP 71 tahun 2010 terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Operasional (LO), (3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (4) Neraca, (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **2.5. Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Tandi, Tommy, & Untu, 2018 menyatakan bahwa definisi karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut (Halim, 2008) laporan keuangan daerah yang disajikan diharapkan benar-benar harus berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Sedangkan (Bastian, 2006) mengatakan, diperlukan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Karakteristik suatu laporan keuangan menurut Governmental Accounting Standards Board (1987) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting (par. 62) menyatakan bahwa: *Financial reporting is the means of communicating financial information to users. For this communication to be effective, information in financial reports must have these basic characteristics: understandability, reliability, relevance, timeliness, consistency, and comparability.* “Laporan keuangan merupakan pengkomunikasian informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Agar komunikasi lebih efektif, informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik dasar

meliputi mudah dipahami, reliabel, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat diperbandingkan”.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan dikatakan berkualitas apabila dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan penting bagi pengguna laporan keuangan.

Dalam SAP dinyatakan bahwa, ada 4 (empat) karakteristik yang harus dimiliki agar Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas yaitu:

**1. Relevan/Relevance;**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Dan agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu dan lengkap sehingga berguna bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan.

**2. Andal/Realinility;**

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajianya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu:

- a. Penyajian Jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; dan
- c. Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### **3. Dapat dibandingkan/Comparability;**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### **4. Dapat dipahami/Understandability.**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

#### **3. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah antara lain penerapan SAP, kapasitas SDM, penerapan SPIP, pemanfaatan dan penguasaan TI, pengelolaan barang milik daerah (BMD).

##### **3.1. Penerapan SAP**

###### **3.1.1. Pengertian SAP.**

Bastian, 2006 “SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Serta mengacu pada regulasi, sistem dan sarana pendukung, serta sumber daya manusia”

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas. (Renyowijoyo, 2008)”

Sedangkan di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang harus digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang di dalamnya memuat 15 (lima belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai berikut:

1. PSAP 01 (Penyajian Laporan Keuangan).
2. PSAP 02 (Laporan Realisasi Anggaran).
3. PSAP 03 (Laporan Arus Kas).
4. PSAP 04 (Catatan Atas Laporan Keuangan).
5. PSAP 05 (Akuntansi Persediaan).
6. PSAP 06 (Akuntansi Investasi).
7. PSAP 07 (Akuntansi Aset Tetap).
8. PSAP 08 (Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan).
9. PSAP 09 (Akuntansi Kewajiban).
10. PSAP 10 (Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan).
11. PSAP 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian).
12. PSAP 12 (Laporan Operasional).
13. PSAP 13 (Akuntansi Pelaporan Badan Layanan Umum).
14. PSAP 14 (Akuntansi Aset Tidak Berwujud).
15. PSAP 15 (Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan).

### **3.1.2. Tujuan dan Manfaat SAP.**

#### **3.1.2.1. Tujuan SAP.**

Menurut (Bastian, 2006) tujuan SAP adalah “Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah”. Sedangkan menurut (Darise, 2009) “SAP dijadikan pedoman untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”.

#### **3.1.2.2. Manfaat SAP.**

Menurut (Aryani, 2013) tentang manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:“Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan

Mardiasmo, 2018 menyatakan bahwa tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan dampak negatif seperti rendahnya realibilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian. Penerapan SAP diharapkan dapat menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik karena dapat

memunculkan suatu transparansi, partisipasi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah maupun negara.

Dengan diterapkannya SAP dalam menyusun/menyajikan laporan keuangan, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga informasi keuangan pemerintah dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di pemerintahan serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan SAP secara konsisten diharapkan dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan kesalahan yang biasa terjadi di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu dengan berpedoman pada SAP akan tercipta keseragaman dari laporan keuangan pemerintah yang disusun dan disajikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai informasi pada laporan yang disusun dan disajikan.

### **3.1.3. Indikator Penerapan SAP.**

Menurut (Bastian, 2006) dan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP, penyajian laporan keuangan terdiri sebagai berikut:

1. Basis akrual
2. Komponen laporan keuangan
3. Periode pelaporan

Penjelasan masing-masing indikator SAP adalah sebagai berikut:

1. Basis akrual.

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan

menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

## 2. Komponen dalam laporan keuangan.

Komponen dalam laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut: (1) LRA, (2) LPSAL, (3) Neraca, (4) LO, (5) LAK, (6) LPE dan (7) CaLK.

## 3. Periode Pelaporan

Laporan keuangan sekurang-kurangnya disusun dan disajikan sekali dalam satu tahun. Dalam hal, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi sebagai berikut berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan

### **3.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia**

#### **3.2.1. Pengertian Kapasitas dan Kualitas SDM.**

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Kompetensi ini dapat diperoleh baik dari

pendidikan maupun dari bimbingan teknis dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai negeri sipil.

Kapasitas SDM adalah kemampuan seseorang/individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi (Wirawan,& Burton, 2010).

Menurut Widodo, 2001 (dalam Kharis) kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan dan pelatihan, yang memadai. (Hamali, 2018) sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Ada tiga pengertian sumber daya manusia yaitu;

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan);
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya;
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non financial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. (Sedarmayanti, 2012).

Ada dua pengertian Sumber Daya Manusia (SDM): Pertama, merupakan usaha kerja/jasa selama proses produksi. Atau sumber daya manusia merupakan cerminan usaha yang dilakukan oleh seseorang pada satu waktu untuk dalam usahanya menghasilkan barang/jasa. Sedangkan yang kedua, sumber daya manusia terkait dengan kemampuan manusia itu sendiri untuk bekerja dalam upayanya menghasilkan barang/jasa. Kemampuan dalam bekerja dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan secara ekonomis baik berupa barang/jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat (Sumarsono, 2003).

Kapasitas SDM merupakan kemampuan dari seseorang/individu di dalam suatu organisasi atau kelembagaan maupun di dalam suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangannya yang ada padanya dalam upaya mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien (Urban, n.d.)

### **3.2.2. Indikator Kapasitas SDM.**

Menurut (Griffin, 2013), Kapasitas SDM diukur melalui:

#### **1. Pendidikan.**

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi: (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal, (c) pendidikan nonformal.

#### **2. Pelatihan.**

Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi

tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

### 3. Pengalaman.

Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan (Tobari, 2014).

Arianty, Bahagia, Lubis, & Siswadi, 2016 menyatakan indikator dari kualitas SDM yaitu sebagai berikut:

1. Intelektualitas (Pengetahuan dan Keterampilan) terdiri dari:
  - a. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan industrialisasi.
  - b. Mempunyai pengetahuan bahasa, baik bahasa nasional, bahasa daerah dan paling sedikit menguasai satu bahasa asing.
2. Pendidikan.
  - a. Mempunyai kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
  - b. Mempunyai ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki SDM yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. SDM yang kompeten diharapkan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM Pemda dalam memahami dan

menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Suwanto, Priansyah, & Juni, 2011).

### **3.3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

#### **3.3.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Pimpinan kementerian dan lembaga serta bupati/walikota berkewajiban melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tanggungjawab ini merupakan bagian dari tanggungjawab pengelolaan pemerintahan agar tercipta pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini didasarkan pada sistem pengendalian intern harus berjalan pada seluruh kegiatan pemerintahan, akan tetapi sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh sumber daya manusia sehingga hanya memberikan keyakinan yang memadai dan bukan keyakinan yang mutlak. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai, semua kegiatan pemerintahan dapat mencapai tujuannya efisien dan efektif, serta melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, dapat melindungi aset pemerintah dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu metode yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh sumber daya manusia, struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua kegiatan pemerintahan mencapai tujuannya, berjalan efisien dan efektif dalam rangka menjamin keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **3.3.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.**

Pengendalian internal mutlak harus dilakukan oleh perusahaan/organisasi guna mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan/organisasi. Menurut (Yunita, 2008) tujuan pengendalian internal adalah “untuk memberikan jaminan dan meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai; untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan; untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi”.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan SPIP yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektifitas setiap kegiatan.

Jika kegiatan pemerintah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan sumber daya yang memenuhi standar maka kegiatannya dapat dikatakan efisien. Sedangkan apabila kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan tujuan tercapai sesuai dengan yang ditetapkan maka kegiatannya dapat dikatakan efektif.

2. Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Salah satu tujuan disusun dan disajikan laporan keuangan adalah untuk membatu para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Agar pengguna laporan tidak salah dalam pengambilan keputusan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus valid, handal dan layak dipercaya serta menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan apabila laporan keuangan yang disajikan tidak benar, maka akan berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan.

3. Pengamanan aset.

Aset diperoleh dari belanja yang telah dianggarkan dalam APBN/APBD yang dananya bersumber dari masyarakat baik berupa penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Pengamanan aset mutlak perlu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah akan tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan kelalaian dalam pengelolaan dan pengamanan aset dapat berakibat hilangnya aset, penggelapan ataupun manipulasi lainnya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap kegiatan dan transaksi adalah perbuatan hukum. Oleh karenanya dalam melaksanakan transaksi dan kegiatan harus sesuai dan tidak melanggar prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelanggaran hukum dapat menyebabkan tindakan pidana ataupun perdata.

**3.3.3. Indikator Penilaian SPIP.**

Dalam mengukur keberhasilan penerapan SPIP digunakan indikator-indikator sesuai dengan PP 60 tahun 2008 sebagai berikut:

## **1. Lingkungan Pengendalian;**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, diantaranya melalui:

### **a. Penegakan integritas dan nilai etika;**

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
2. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah;
3. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
5. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

### **b. Komitmen terhadap kompetensi;**

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;

3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya;
  4. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:
1. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
  2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
  3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan spip;
  4. Melindungi aset, informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
  5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
  6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
1. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
  2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
  3. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;

4. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
  5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
  2. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
  3. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
  2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
  3. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan  
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
  3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.  
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

## **2. Penilaian Risiko;**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:

a. Identifikasi risiko;

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

1. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
2. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
3. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b. Analisis risiko.

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

**3. Kegiatan Pengendalian;**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

**4. Informasi dan Komunikasi.**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi

atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

## **5. Pemantauan Pengendalian Intern.**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

### **3.4. Pemanfaatan TI.**

#### **3.4.1. Pengertian Pemanfaatan TI**

Dalam KBBI pemanfaatan merupakan proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan.

Menurut (Widjajanto, 2015) pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi informasi dengan tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam divertasi aplikasi yang digunakan.

Sedangkan Menurut (Hall, 2015), Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja”

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik (Horngren, 2012).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan TI adalah perbuatan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi dalam upaya penyelesaian tugas serta meningkatkan kinerja organisasi.

### **3.4.2. Tujuan dan Fungsi TI.**

Menurut Sutarman (2012:17) tujuan dari TI adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan masalah.
2. Untuk membuka kreativitas.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Sedangkan fungsi TI menurut (Widjajanto, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Menangkap (Capture).

Menangkap dapat dipahami sebagai masukan, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mikrofon dan lain-lain.

2. Mengolah (Processing).

Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Data yang diolah dapat berupa konversi (mengubah data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisional), perhitungan (kalkulasi), dan sistesis (penggabungan) berbagai bentuk data dan informasi.

3. Menghasilkan (Generating)

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam berbagai bentuk yang berguna. Misalnya: laporan, tabel, grafik, dan bentuk lainnya.

#### 4. Menyimpan (Storage)

Merekam atau menyimpan data dan informasi ke dalam media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke hardisk, tape, disket, compact disc (CD) ataupun media penyimpanan lainnya.

#### 5. Mencari kembali (Retrieval)

Menelusuri, mendapatkan kembali berbagai data dan informasi dengan menyalin (copy) data dan informasi yang sudah tersimpan. misalnya mencari supplier yang sudah lunas.

#### 6. Transmisi (Transmission).

Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui sistem jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya.

### **3.4.3. Indikator Pemanfaatan TI**

Indikator pemanfaatan TI menurut (Widjajanto, 2015) adalah sebagai berikut:

#### 1. Perangkat Keras (Hardware).

Perangkat keras adalah perangkat fisik yang membangun TI. Contohnya harddisk, monitor, memori, keyboard, mouse, CPU, kabel jaringan dan peralatan I/O.

#### 2. Perangkat Lunak (Software).

Merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer.

### 3. Jaringan dan Komunikasi.

Merupakan sistem yang saling terhubung serta menunjang pemakaian bersama diantara komputer yang berbeda-beda.

Indikator pemanfaatan TI menurut (Hall, 2015), adalah sebagai berikut:

1. Memiliki perangkat komputer.
2. Memiliki dan memanfaatkan jaringan internet.
3. Mengadakan proses akuntansi yang terkomputerisasi.
4. Menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Adanya laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi.
6. Adanya pemeliharaan peralatan.
7. Adanya perbaikan peralatan yang rusak/usang (Hall, 2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Pemanfaatan TI diantaranya adalah: (1) Pemanfaatan komputer baik hardware maupun software, dan (2) penggunaan sistem jaringan yang terintegrasi.

#### **3.4.4. Pengelolaan BMD.**

##### **3.4.4.1. Pengertian Pengelolaan BMD.**

Menurut KBBI pengelolaan memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi;
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut (Tobari, 2014) asset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuai uang dan surat berharga lainnya.

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014, BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **3.4.4.2. Tujuan Pengelolaan BMD.**

Pengelolaan BMD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan. Selain itu, BMD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan BMD yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan BMD harus dilakukan dengan baik dan benar (Oktavia dan Sumini,2010)

Pengelolaan BMD adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani BMD, dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset/BMD. Dengan pengelolaan

BMD yang efisien dan efektif yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendaliannya diharapkan dapat menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku terlebih pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### **3.4.4.3. Indikator Pengelolaan BMD.**

Dalam Permendagri 19 tahun 2016, indikator pengelolaan BMD adalah sebagai berikut:

##### **1. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran;**

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan barang milik daerah harus mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

##### **2. Pengadaan;**

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui

Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

### **3. Penggunaan;**

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Penggunaan barang milik daerah meliputi:

- a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan
- d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

- a. barang persediaan;
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

### **4. Pemanfaatan;**

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

#### **5. Pengamanan Dan Pemeliharaan;**

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi:

- a. Pengamanan Fisik;
- b. Pengamanan Administrasi;
- c. Pengamanan Hukum.

#### **6. Penilaian;**

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah dikecualikan untuk:

- a. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
- b. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada SAP.

## **7. Pemindahtanganan;**

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

## **8. Pemusnahan;**

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

- a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

## **9. Penghapusan;**

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;

- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena:

- a. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. Menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. Pemusnahan; atau
- e. Sebab lain.

#### **10. Penatausahaan;**

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Dalam daftar barang milik daerah termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

### 11. Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan;

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya

### B. Kajian Penelitaian Yang Relevan

Berikut dijelaskan hasil penelitaian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Review Penelitian Yang Relevan**

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
(Beest, 2009)	Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics	Dari penelitian diperoleh informasi, kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh pengendalian intern
(Yuliani, Nadirsyah, Bakar, 2010)	Pengaruh pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemko Banda Aceh).	Secara simultan dan parsial Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
(Yosefrinaldi, 2013)	Pengelolaan Aset Daerah Berkaitan Opini Disclaimer BPK di Kabupaten Tojo Una Una di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007	Variabel bebas secara parsial hanya akan memberikan pengaruh yang kecil terhadap variabel terikatnya, namun secara simultan berpengaruh secara signifikan. Sehingga harus dilakukan dan diterapkan sistem

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		dalam rangka mendukung pengelolaan aset.
(Irwan, 2011)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
(Sukmaningrum, 2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota Semarang)	Kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Sistem pengendalian intern. Sedangkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan tidak dipengaruhi oleh factor eksternal.
(Wansyah, H., Darwin, & Bakar, 2012)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh	Nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh Kapasitas sumber daya manusia. Nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh Pengendalian teknologi informasi. Nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh kegiatan pengendalian.
(Yosefrinaldi, 2013)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah. (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se- Sumatera Barat).	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan dipengaruhi oleh kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan SPIP.
(Armando, 2013)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi empiris pada SKPD	Nilai informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bukit Tinggi secara signifikan positif dipengaruhi oleh SPIP dan pengawasan keuangan daerah.

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
	di Kota Bukit Tinggi)	
(Aryani, 2013)	Analisis factor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAP, Kualitas SDM, SPI, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi secara simultan dan Parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II
(Pakpahan, 2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAP, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Sudrajad (2013)	Pengaruh perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemeliharaan terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Depok.	Secara simultan maupun parsial Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemeliharaan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Herawati dan Susanto, 2009)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada SKPD Pemda Cianjur)	Hasilnya menunjukkan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Secara Parsial Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Komunikasi dan Pemantauan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, akan tetapi hanya Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
(Syarifudin, 2014)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab. Kebumen).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas LKPD tidak secara signifikan dipengaruhi oleh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern;</li> <li>2. Secara signifikan kualitas LKPD dipengaruhi oleh SPIP;</li> <li>3. SPIP dipengaruhi oleh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern;</li> <li>4. SPIP dapat memediasi hubungan antara kapabilitas SDM dan kualitas LKPD;</li> <li>5. SPIP tidak dapat memediasi</li> </ol>

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		hubungan antara peran audit intern dan kualitas LKPD;
(Mahaputra, 2014)	Analisis sistem-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Gianyar)	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Gianyar.
(Sukmaningrum, 2012)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi dan SPI Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Sagara (2015)	The effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting.	Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi SDM secara signifikan berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Kompetensi SDM Secara Parsial Tidak berpengaruh signifikan.
Chintya Dwi Hadiyani (2015)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah	Menemukan dalam penelitiannya bahwa pengelolaan BMD mempunyai kontribusi yang baik dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Sudiaranti, Ulupui dan Budiasih (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menyebutkan bahwa Kompetensi SDM dan Penerapan SAP dan SPIP mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara langsung dan tidak langsung

### C. Kerangka Berpikir/Konseptual

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah antara lain: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

hal ini Penerapan SAP, Kualitas SDM, Penerapan SPIP, Penguasaan dan Pemanfaatan TI dan Pengelolaan BMD.

## **1. Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Dalam ketentuan umum PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan mengikat secara hukum yang mengikat secara hukum dan dirancang dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

SAP wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas. SAP dapat dijadikan jembatan untuk menyatukan persepsi antara penyusun dan penyaji, pengguna/stakeholders dan auditor.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, pemerintah harus secara konsisten menerapkan SAP, sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat. Penerapan SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan juga dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan demikian penerapan SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akan berdampak semakin berkualitasnya laporan keuangan pemerintah.

Aryani, 2013, Saragih, 2007, Sukmaningrum, 2012, dan Mulyani, 2014 membuktikan dalam penelitiannya bahwa Penerapan SAP, Kualitas SDM, SPI,

Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi secara simultan dan Parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## **2. Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009). Kapasitas SDM adalah kemampuan seseorang/individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kualitas/Kapasitas SDM merupakan kemampuan dari seseorang/individu di dalam suatu organisasi atau kelembagaan maupun di dalam suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenanganyang ada padanya dalam upaya mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien (Urban, n.d.).

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Kompetensi ini dapat diperoleh baik dari pendidikan maupun dari bimbingan teknis dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai negeri sipil.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, pemerintah membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi dan ketrampilan yang memadai terutama yang memahami akuntansi, pengelolaan keuangan dan peraturan yang berlaku terutama SAP. Dengan adanya SDM yang berkompeten serta mampu memahami logika akuntansi yang baik akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian SDM yang berkualitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Wansyah, H., Darwin, & Bakar, 2012, Sari, Martani, & Setyaningrum, 2015, serta Syarifudin, 2014 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh Kapasitas sumber daya manusia, Nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh teknologi informasi. Nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh kegiatan pengendalian.

### **3. Pengaruh Penerapan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP).

Salah satu tujuan dari SPI menurut (Warren. C.S, 2009) adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, kekeliruan dan kesalahan dalam perhitungan dapat diminimalisir. Agar sistem yang dibangun berkualitas, maka setiap bagian dari sistem tersebut harus terintegrasi dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diantara bagian dari sistem yang mempunyai tugas memperlancar jalannya Sistem Informasi Akuntansi adalah pengendalian intern. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tidak terlepas dari SPIP yang baik. Dengan meningkatkan kualitas SPIP diharapkan akan sejalan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Irwan, 2011, Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, 2015) dalam penelitiannya menyatakan SPIP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

#### **4. Pengaruh Penguasaan dan Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik terbitlah PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan PP nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa “Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah”.

Dengan keluarnya PP tersebut baik pemerintah pusat maupun daerah wajib memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan sistem kerja yang terintegrasi antar unit organisasi di pemerintah pusat ataupun antar SKPD di Pemerintah Daerah dan bahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemanfaatan teknologi juga akan menghasilkan informasi keuangan lebih cepat dan akurat serta berkualitas.

Dalam penelitiannya (Yosefrinaldi, 2013) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemda. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wansyah, H., Darwin, & Bakar, 2012) diyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan.

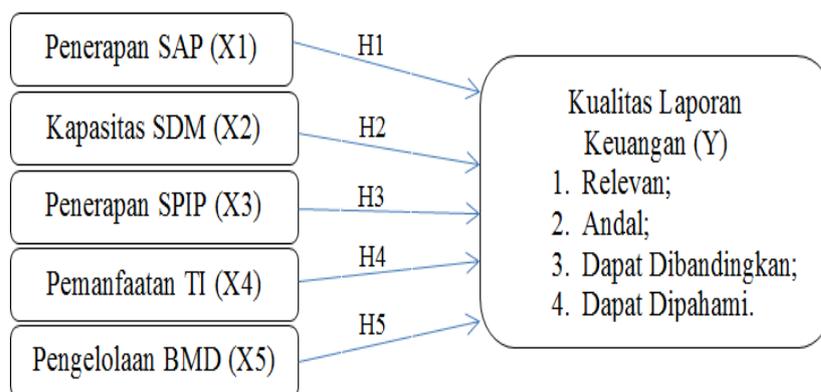
## **5. Pengaruh Pengelolaan BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Dalam rangka menciptakan pengelolaan BMD yang baik terbitlah Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, dan diharapkan pengelolaan BMD menjadi lebih baik. Cukup banyak BMD yang dikuasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, hal ini dikarenakan penyajian BMD tidak didukung oleh dokumen yang memadai. Atau dapat dikatakan pengelolaan BMD masih kurang baik.

Pengelolaan BMD yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan dalam penyajian di dalam Neraca Pemerintah mempunyai nilai yang sangat signifikan. Dan dalam LHP BPK-RI masalah yang selalu menjadi temuan juga terkait pengelolaan BMD yang kurang dan bahkan tidak memadai.

Syaukat dan Abdul Kohar Irwanto, 2018, dalam penelitiannya menyatakan bahwa lemahnya pengelolaan BMD mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan Chintya Dwi Hadiyani (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan BMD mempunyai kontribusi yang baik dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Sumber : Data Diolah Penulis (2021)

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian, landasan teoritis dan kerangka konseptual maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
2. Kualitas Sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
4. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan asosiatif. (Sugiyono, 2018) mengemukakan bahwa penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variable atau lebih dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungannya. Oleh karenanya melalui penelitian ini dimungkinkan untuk membangun suatu teori yang dapat menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan suatu gejala.

Penelitian ini untuk melihat Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas SDM, Penerapan SPIP, Pemanfaatan TI dan Pengelolaan BMD terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode survey dari suatu populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dan direncanakan mulai bulan Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021.

**Tabel 3.1 Rencana Penelitian**

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Seminar Proposal									■	■	■	■								
4	Perbaikan/Acc Proposal											■	■								
5	Pengolahan Data													■	■	■	■				
6	Penyusunan Tesis															■	■	■	■	■	■
7	Bimbingan Tesis dan Meja Hijau																				■

## **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi merupakan kumpulan elemen yang mengandung ciri-ciri khusus yang dapat membantu untuk dapat mengambil suatu kesimpulan. Menurut (Sugiyono, 2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 54 (lima puluh empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat, dan Kecamatan dan masing-masing SKPD diambil 3 (tiga) orang yaitu: kasubbag keuangan selaku PPK-SKPD atau pembantu PPK-SKPD, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara dan Pengurus Barang ditambah 5 (lima) orang auditor Intern pada Pemkab Langkat sehingga populasi berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang.

### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil oleh peneliti yang dianggap dapat mewakili semua populasi. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat wakil populasi yang akan diteliti. Menurut Indriantoro dan Supomo dalam penelitian seorang peneliti dapat meneliti seluruh populasi, hal ini biasa disebut sensus dan peneliti juga dapat meneliti hanya sebagian dari populasi yang ada, hal ini biasa disebut penelitian dengan sampel.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2018) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang

penulis pilih dalam penelitian ini adalah jumlah anggaran dan materialitas temuan dalam pemeriksaan BPK, maka penulis hanya memilih kasubbag keuangan selaku PPK-SKPD /pembantu PPK-SKPD, bendahara pengeluaran/pembantu bendahara, dan Pengurus Barang pada Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Inspektorat sebagai responden tidak mengikut sertakan PPK-SKPD/pembantu PPK-SKPD, bendahara pengeluaran /pembantu bendahara, dan Pengurus Barang pada Kecamatan. Selain itu juga auditor dari inspektorat diambil sebagai sampel dikarenakan berkaitan erat dengan SPIP. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) orang dan sekaligus dijadikan responden penelitian.

**Tabel 3.2**  
**Tabel Populasi dan Sampel**  
**SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat**

No.	SKPD	Jumlah Populasi	Sampel				Jumlah Sampel
			PPK	Bend. Pengeluaran	Auditor	Pengurus Barang	
1	Dinas Pendidikan	3	1	1	-	1	3
2	Dinas Kesehatan	3	1	1	-	1	3
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	1	1	-	1	3
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3	1	1	-	1	3
5	Dinas Sosial	3	1	1	-	1	3
6	Dinas Ketenagakerjaan	3	1	1	-	1	3
7	Dinas Lingkungan Hidup	3	1	1	-	1	3
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	1	1	-	1	3
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	1	1	-	1	3
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak	3	1	1	-	1	3
11	Dinas Perhubungan	3	1	1	-	1	3
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	1	1	-	1	3
13	Dinas Koperasi	3	1	1	-	1	3
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3	1	1	-	1	3
15	Dinas Pemuda dan	3	1	1	-	1	3

No.	SKPD	Jumlah Populasi	Sampel				Jumlah Sampel
			PPK	Bend. Pengeluaran	Auditor	Pengurus Barang	
	Olahraga						
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3	1	1	-	1	3
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	1	1	-	1	3
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3	1	1	-	1	3
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	1	1	-	1	3
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	1	1	-	1	3
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	1	1	-	1	3
22	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3	1	1	-	1	3
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	1	1	-	1	3
24	Badan Pendapatan Daerah	3	1	1	-	1	3
25	Badan Kepegawaian Daerah	3	1	1	-	1	3
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3	1	1	-	1	3
27	Sekretariat Daerah	3	1	1	-	1	3
28	Sekretariat DPRD	3	1	1	-	1	3
29	Inspektorat	8	1	1	5	1	8
30	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura	3	1	1	-	1	3
31	Satuan Polisi Pamong Praja	3	1	1	-	1	3
32	Kecamatan Bahorok	3	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Salapian	3	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Kuala	3	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Selesai	3	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sei Bingai	3	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Binjai	3	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Stabat	3	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Wampu	3	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Secanggang	3	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Hinai	3	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Tanjung Pura	3	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Gebang	3	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Babalan	3	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Berandan Barat	3	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Sei Lapan	3	-	-	-	-	-

No.	SKPD	Jumlah Populasi	Sampel				Jumlah Sampel
			PPK	Bend. Pengeluaran	Auditor	Pengurus Barang	
47	Kecamatan Pangkalan Susu	3	-	-	-	-	-
48	Kecamatan Besitang	3	-	-	-	-	-
49	Kecamatan Padang Tualang	3	-	-	-	-	-
50	Kecamatan Sawit Seberang	3	-	-	-	-	-
51	Kecamatan Batang Serangan	3	-	-	-	-	-
52	Kecamatan Kutambaru	3	-	-	-	-	-
53	Kecamatan Pematang Jaya	3	-	-	-	-	-
54	Kecamatan Sirapit	3	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>98</b>

#### **D. Definisi Operasional Variabel**

Pada penelitaian ini variabel yang ada adalah variabel independen dan variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2018) “variabel bebas merupakan variabel yang dapat memberi pengaruh terhadap variabel terikat”. Variabel variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini penerapan SAP (X1), kualitas Sumber Daya Manusia (X2), penerapan SPIP (X3), penguasaan dan pemanfaatan TI (X4), dan pengelolaan barang milik daerah (X5). Kemudian variabel dependen dari penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y).

#### **1. Variabel Dependen (Variabel Terikat).**

##### **1.1. Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah taraf (mutu) atau terpenuhinya kriteria atau harapan yang melekat pada informasi laporan keuangan (Wilkinson, 2000:18). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi

aturan dalam hal ini berpedoman pada SAP baik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang pada gilirannya diharapkan tujuan dari disusunnya laporan keuangan dapat tercapai. PP nomor 71 tahun 2010 mensyaratkan laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat diukur dengan relevan, andal, dan dapat dipahami serta diperbandingkan.

## **2. Variabel Independen (Variabel Bebas).**

### **2.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1)**

Kiranayanti (2016) “pemahaman peraturan adalah pemahaman ASN mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan terkait SAP”. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipedomani dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

### **2.2. Kualitas Sumber Daya Manusia/SDM (X2)**

Kapasitas SDM yang dimaksud adalah kemampuan dari kasubbag keuangan selaku PPK-SKPD, pembantu PPK-SKPD, bendahara pengeluaran/pembantu bendahara, dan Pengurus Barang serta staf Inspektorat sebagai auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan dari setiap pegawai dapat dilihat dari pendidikan, bimbingan teknis dan pelatihan yang pernah diikuti, serta pemahamannya terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi.

### **2.3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP (X3)**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### 2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi/TI (X4)

Pemanfaatan TI dapat berupa pemanfaatan komputer, *software*, database, dan jaringan internet, serta jenis lainnya yang terkait dengan TI agar dapat mempermudah penyelesaian tugas pegawai baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan BMD. Komputer, software dan jaringan internet sebagai perangkat lunak dapat difungsikan sebagai sarana pengolahan dan penyimpanan data yang nantinya akan dikirimkan melalui jaringan internet ke semua pengguna informasi.

#### 2.5. Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD (X5)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 lingkup pengelolaan Barang Milik negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Indikator variabel ini adalah Perencanaan, penilaian, penatausahaan dan pengawasan barang milik daerah.

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Penerapan SAP (X1)	Pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (Kiranayanti, 2016)	1. Basis Akuntansi yang digunakan; 2. Komponen Laporan Keuangan; 3. Laporan keuangan disusun secara periodikal 1 (satu) tahun sekali.	Ordinal
Kualitas SDM (X2)	Kemampuan dari kasubbag keuangan selaku PPK-SKPD, pembantu PPK-SKPD, bendahara pengeluaran/pembantu	1. Pendidikan; 2. Pelatihan; 3. Pengalaman	Ordinal

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
	bendahara, dan Pengurus Barang serta staf Inspektorat sebagai auditor internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kemampuan ini dapat diperoleh dari pendidikan, bimbingan teknis/pelatihan dan pengalaman (Mardiasmo, 2009).		
SPIP (X3)	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Sutrisno, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Pengendalian;</li> <li>2. Penilaian Resiko;</li> <li>3. Aktivitas pengendalian;</li> <li>4. Informasi dan komunikasi.</li> </ol>	Ordinal
Pemanfaatan TI (X4)	Pemanfaatan TI dapat berupa pemanfaatan computer (hardware dan software) database, dan jaringan internet, serta jenis lainnya yang terkait dengan teknologi informasi agar dapat mempermudah penyelesaian tugas pegawai baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan barang milik daerah (Halim, 2014).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Komputer (Hardware dan software);</li> <li>2. Pengolahan data dengan pemanfaatan database yang terintegrasi (Jaringan dan Komunikasi)</li> </ol>	Ordinal
Pengelolaan BMD (X5)	Pengelolaan BMD mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan Penganggaran;</li> <li>2. Pengadaan;</li> <li>3. Penggunaan;</li> <li>4. Pemanfaatan;</li> <li>5. Pengamanan dan Pemeliharaan;</li> <li>6. Penilaian;</li> </ol>	Ordinal

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
	pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014)	7. Pemindahtanganan; 8. Pemusnahan; 9. Penghapusan; 10. Penatausahaan; 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.	
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan disusun dan disajikannya laporan keuangan (Wilkinson, 2000:18).	1. Relevan; 2. Andal; 3. Dapat dibandingkan; 4. Dapat dipahami.	Ordinal

#### E. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah angket kuisisioner.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan angket kuisisioner. Menurut Lubis (2012) “data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh si peneliti pada saat berlangsungnya penelitian”.

Untuk memperoleh informasi kuisisioner disebar dan dikumpulkan dengan membaginya dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. Pertama: kuisisioner diberikan kepada 98 (Sembilan puluh delapan) responden yaitu: kasubbag keuangan selaku PPK-SKPD atau pembantu PPK-SKPD, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara, dan Pengurus Barang serta sebagai auditor internal pada Inspektorat, waktu yang diberikan untuk

pengisian kuesioner adalah 14 (empat belas) hari, jika responden belum selesai diberi tambahan waktu 1 (satu) minggu. Setelah diberikan waktu tambahan dan responden tetap tidak menyelesaikan kuesioner maka responden tersebut tidak dapat dijadikan sampel.

6. Kedua: setelah kuesioner diperoleh dari responden selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Sebelum pengumpulan data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas kuisioner yang digunakan, untuk memastikan konsistensi dan akurasi data yang diperoleh dari kuesioner. Pengujian yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

### **1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Setelah itu tentukan hipotesis  $H_0$ : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk dan  $H_a$ : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Setelah menentukan hipotesis  $H_0$  dan  $H_a$ , kemudian uji signifikan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung (*table corrected item-total correlation*) dengan  $r$  tabel (table Product Moment dengan signifikan 0,05) untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n-k$  (Ghozali, 2011).

Adapun rumus perhitungan uji validitas adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2) (n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Sumber : (Juliandi et al., 2014)

Dimana :

r = Koefisien korelasi antara variable (X) dan variabel (Y)

n = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$  = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum y_i$  = Jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum x^2)$  = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum y^2)$  = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

$(\sum x)^2$  = Kuadrat Jumlah Pengamatan variabel X

$(\sum y)^2$  = Kuadrat Jumlah jumlah variabel Y

$(\sum x y)$  = Jumlah hasil kali variabel X dan Y.

Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut:

Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut valid.

Jika r hitung < r tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid.

Kriteria lainnya dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut: Bila korelasi positif dan  $r > 0,3$  maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Butir pertanyaan tidak valid tidak diikutsertakan dalam uji hipotesis. Dalam pengujian kualitas data responden, apakah data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Maka dilakukan tahapan pengujian data dengan menggunakan uji validitas sebagai ukuran untuk menguji sejauhmana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian (Juliandi, dkk., 2015:76).

Adapun untuk mendapatkan instrument pada butir pertanyaan benar-benar valid, maka dilakukan uji coba terbatas terhadap 30 responden yang ditetapkan dari ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta ASN Inspektorat pada Pemko Tanjung Balai. Uji coba terbatas ini digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat validitas item pertanyaan.

**Tabel 3.4**  
**Uji Validitas**

Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	r-Kritis	Keterangan
<b>Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP</b>			
X1.1	0,424	0,3	Valid
X1.2	0,371	0,3	Valid
X1.3	0,526	0,3	Valid
X1.4	0,461	0,3	Valid
X1.5	0,573	0,3	Valid
X1.6	0,623	0,3	Valid
X1.7	0,566	0,3	Valid
X1.8	0,454	0,3	Valid
X1.9	0,583	0,3	Valid
X1.10	0,501	0,3	Valid
<b>Kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM</b>			
X2.1	0,548	0,3	Valid
X2.2	0,816	0,3	Valid
X2.3	0,799	0,3	Valid
X2.4	0,560	0,3	Valid
X2.5	0,795	0,3	Valid
<b>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP</b>			
X3.1	0,514	0,3	Valid
X3.2	0,531	0,3	Valid
X3.3	0,556	0,3	Valid
X3.4	0,421	0,3	Valid
X3.5	0,369	0,3	Valid
X3.6	0,609	0,3	Valid
X3.7	0,759	0,3	Valid
X3.8	0,556	0,3	Valid
X3.9	0,514	0,3	Valid
X3.10	0,816	0,3	Valid
<b>Pemanfaatan Teknologi Informasi/TI (X4)</b>			
X4.1	0,795	0,3	Valid
X4.2	0,631	0,3	Valid
X4.3	0,544	0,3	Valid

<b>Item Pernyataan</b>	<b>Corrected Item-Total Correlation</b>	<b>r-Kritis</b>	<b>Keterangan</b>
X4.4	0,498	0,3	Valid
X4.5	0,548	0,3	Valid
X4.6	0,816	0,3	Valid
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD</b>			
X5.1	0,782	0,3	Valid
X5.2	0,577	0,3	Valid
X5.3	0,746	0,3	Valid
X5.4	0,628	0,3	Valid
X5.5	0,497	0,3	Valid
X5.6	0,728	0,3	Valid
X5.7	0,690	0,3	Valid
X5.8	0,683	0,3	Valid
X5.9	0,467	0,3	Valid
X5.10	0,419	0,3	Valid
X5.11	0,423	0,3	Valid
X5.12	0,642	0,3	Valid
X5.13	0,625	0,3	Valid
X5.14	0,836	0,3	Valid
X5.15	0,507	0,3	Valid
X5.16	0,584	0,3	Valid
X5.17	0,780	0,3	Valid
X5.18	0,717	0,3	Valid
X5.19	0,618	0,3	Valid
X5.20	0,486	0,3	Valid
X5.21	0,570	0,3	Valid
<b>Kualitas Laporan Keuangan</b>			
Y.1	0,752	0,3	Valid
Y.2	0,853	0,3	Valid
Y.3	0,720	0,3	Valid
Y.4	0,676	0,3	Valid
Y.5	0,682	0,3	Valid
Y.6	0,752	0,3	Valid
Y.7	0,766	0,3	Valid

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa setiap item pernyataan yang berhubungan dengan variabel penelitian ini yang disebarkan kepada 30 responden memiliki nilai  $> 0,3$  (Ghozali, 2011), hal ini menunjukkan bahwa setiap

item pernyataan dari masing-masing indikator dan variabel dinyatakan valid pada kuesioner yang mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut atau ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian.

## 2. Uji Realibilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan setelah pengujian validitas instrumen penelitian. Uji reliabilitas dipakai untuk mengetahui konsistensi dari alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan. Semakin kecil kesalahan pengukuran, semakin reliabel alat pengukur. Dalam pengujian reliabilitas digunakan alpha cronbach, suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) apabila memiliki koefisien kehandalan atau alpha sebesar 0.6 atau lebih. (Juliandi, 2018).

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji Statistik *Cronbach's Alpha*.

$$r = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Sumber : (Juliandi et al., 2014, hal 82)

### Keterangan :

r	= Reliabilitas instrument ( <i>Cronbach alpha</i> )
k	= Banyaknya butir pertanyaan
$\sum \sigma b^2$	= Jumlah varians butir
$\sigma_1^2$	= Varians Total

**Tabel 3.5**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpa	r	Keterangan
Penerapan SAP	0,834	0,7	Reliabel
Kapasitas SDM	0,755	0,7	Reliabel
Penerapan SPIP	0,867	0,7	Reliabel
Pemanfaatan TI	0,704	0,7	Reliabel
Pengelolaan BMD	0,785	0,7	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,846	0,7	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas maka dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach alpha* > 0,7 hal ini menunjukkan bahwa alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan.

#### **F. Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Metode Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif ialah suatu teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan situasi objek penelitian apa adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan tertentu berdasarkan semua data yang telah terkumpul. Berdasarkan pengertian di atas, analisis data dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang situasi yang terjadi atau berlaku pada objek penelitian.

Analisis data statistik deskriptif menyajikan data ke dalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekwensi, diagram. Adapun data-data yang disajikan tersebut adalah data-data yang menampilkan nilai rata-rata, deviasi standar, nilai maksimum dan minimum, tabulasi, dan sebagainya untuk melihat perbedaan data berdasarkan kategori yang ada pada data tersebut dan dipaparkan apa adanya

tanpa melakukan analisis mendalam terhadap data-data tersebut. Berikut rincian data-data tersebut:

- a. Mean ( $\bar{X}$ ) adalah nilai rata-rata.
- b. Modus ( $M_o$ ) adalah nilai varian yang memiliki frekuensi paling tinggi.
- c. Median ( $M_e$ ) adalah nilai tengah, suatu nilai yang membatasi 50% dari frekuensi sebelah atas dan 50% dari frekuensi sebelah bawah.
- d. Maksimal, adalah nilai yang paling tinggi dari data-data yang ada.
- e. Minimal, adalah nilai yang paling rendah dari data-data yang ada.

Untuk melihat kecenderungan penilaian terhadap pernyataan yang diberikan kepada responden, maka dilihat dari nilai rata-rata (Mean). Analisis mean dilakukan dengan membuat suatu batas kelas yang digunakan untuk memutuskan apakah nilai rata-rata dapat masuk dalam kategori baru. Hasil dari rata-rata kemudian dibagi pada rentang skala berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Rentang Skala Interval} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Nilai Tertinggi}}$$

Dalam rentang skala interval dikemukakan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Kategori Skala**

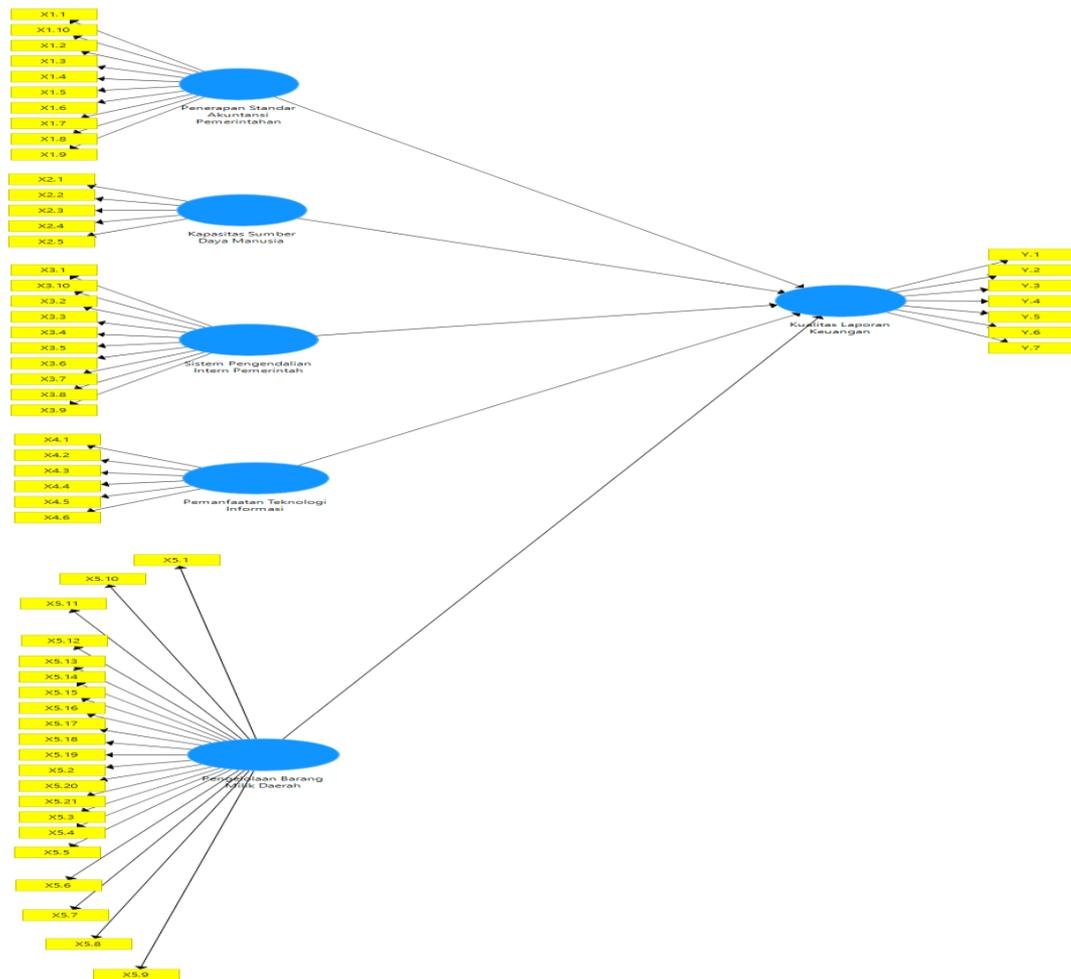
Interval Skala	Kategori
1,00 – 1,80	Tidak Baik/Tidak Pernah/Tidak Memadai
1,81 – 2,61	Kurang Baik/Jarang/Kurang Memadai
2,62 – 3,42	Cukup Baik/Kadang Kadang/Cukup Memadai
3,43 – 4,23	Baik/Sering/Memadai
4,24 – 5,04	Sangat Baik/Sangat Sering/Sangat Memadai

## **2. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metodologi *Partial Least Square* (PLS). Mengolah data serta menarik kesimpulan maka peneliti menggunakan program SmartPLS versi 3.0. penelitian ini menggunakan analisa partial least square untuk keseluruhan hipotesis.

### **2.1 Analisis SEM (*Structural Equation Modelling*)**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS.3 yang dijalankan dengan media komputer. PLS (*partial least square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Menurut Ghozali (2015) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *soft modelling* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Selain itu SEM mampu menguji penelitian yang kompleks dan banyak variabel secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis dengan satu kali estimasi dimana yang lain diselesaikan dengan beberapa persamaan regresi. SEM dapat melakukan analisis faktor, regresi dan jalur sekaligus. Setelah dilakukan uji coba terbatas melalui uji validitas dan reliabilitas, maka terdapat indikator dari item pertanyaan yang dibuang, atau tidak di ikut sertakan dalam analisis selanjutnya. Maka pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan *software Smart PLS ver.3 for Windows*. Berikut adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah:



**Gambar 3.1. Model Struktural PLS Penelitian**

**Keterangan:**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1)

Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)

Pengelolaan Barang Milik Daerah (X5)

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2006), PLS

merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

**a. Model Struktural atau Inner Model**

Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substansif. Model structural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen.

Pengujian hipotesis dilakukan hanya melalui *direct effect*, yaitu:

1. Pengaruh X1 terhadap Y
2. Pengaruh X2 terhadap Y
3. Pengaruh X3 terhadap Y
4. Pengaruh X4 terhadap Y
5. Pengaruh X5 terhadap Y

Inner Model atau smodel structural adalah bagian pengujian hipotesis yang digunakan dalam menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten eksogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Analisis model struktural ini akan menganalisis hubungan antar variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat serta hubungan diantaranya (Julidani, *dkk.*, 2015).

## 1. ***R-Square***

*R-Square* adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya. Ini berguna untuk memprediksi apakah model tersebut baik/buruk Julidani (2015). Kriteria dalam penilaian *R-Square* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *R-square* = 0,75 maka model adalah kuat
- 2) Jika nilai *R-Square* = 0,50 maka model adalah sedang
- 3) Jika nilai *R-Square* = 0,25 maka model adalah lemah

## 2. ***F-Square***

*F-Square* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi (Juliandi, dkk., 2015). Kriteria dalam penilaian *F-Square* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *f-square* = 0,02 maka efek yang kecil dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi.
- 2) Jika nilai *f-square* = 0,15 maka efek yang sedang/moderat dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi.
- 3) Jika nilai *f-square* = 0,35 maka efek yang besar dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi.

## b. **Model Pengukuran atau Outer Model**

Outer Model menganalisis hubungan konstruk (variabel laten) dan indikator. Convergent validity dari model pengukuran dengan model refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. untuk refleksi dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur.

Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai Loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup. Discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan kontruk. Jika kolerasi kontruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada kontruk lainnya.

Model lain untuk menilai Discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap kontruk dengan kolerasi antara kontruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap kontruk lebih besar dari pada nilai kolerasi antara kontruk dengan kontruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur realibilitas compenent score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan composite reability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50.

*Composite reability* yang mengukur suatu kontruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach's Alpha. Nilai yang diharapkan > 0,6 untuk semua konstruk. (Ghozali, 2006). Analisa outer model ini dilakukan untuk memastikan *measurement* yang digunakan apakah layak untuk dijadikan pengukuran, yang artinya valid dan reliabel.

### **1. *Convergent Validity***

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indicator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 % dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin ( 1998) dalam

Ghozali (2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

## 2. *Discriminant Validity*

Discriminant Validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan Crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai Discriminant Validity adalah membandingkan nilai Root Of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai Discriminant Validity yang baik Ghozali (2015). Berikut ini rumus untuk menghitung AVE:

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum IV(\epsilon)}$$

Dimana  $\lambda$ , adalah component loading ke indikator ke  $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda$ . Jika semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan Average Communalities dalam blok. Ghozali (2015) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibanding dengan compositere liability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50.

### 3. *Composite Reliability*

*Composite reliability blok* indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency menurut Ghozali (2015). Dengan menggunakan output yang dihasilkan PLS maka Composite reliability dapat dihitung dengan rumus:

$$P_c = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum IV(\epsilon)}$$

Dimana  $\lambda_i$  adalah component loading ke indikator dan  $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda_i^2$ .

Dibanding dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama. Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bound estimate reliability, sedangkan  $P_c$  merupakan closer approximation dengan asumsi estimate parameter adalah akurat.  $P_c$  sebagai ukuran internal consistence hanya dapat digunakan untuk konstruk reflektif indikator menurut Ghozali (2015).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Penyusunan Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat pada saat ini dilakukan pada kerangka regulasi serta kebutuhan objektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah sesuai undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Berdasarkan undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemkab Langkat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemkab Langkat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat**

<b>No.</b>	<b>SKPD</b>	<b>Alamat</b>
1	Dinas Pendidikan	Jln. Kartini No. 9 Stabat
2	Dinas Kesehatan	Jln. Imam Bonjol No. 53 Stabat
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. T. Amir Hamzah No. 3 Stabat
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jln. Diponegoro No. 2 Stabat
5	Dinas Sosial	Jln. Imam Bonjol No. 67 Stabat
6	Dinas Ketenagakerjaan	Jln. Diponegoro Stabat
7	Dinas Lingkungan Hidup	Jln. Imam Bonjol No. 63 Stabat
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jln. T. Amir Hamzah Stabat
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jln. KH. Wahid Hasyim No. 1 Stabat
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak	Jln. Proklamasi Stabat
11	Dinas Perhubungan	Jln. Proklamasi No. 17 Stabat
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jln. Imam Bonjol No. 57 Stabat
13	Dinas Koperasi	Jln. Kartini No. 7 Stabat
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Jln. Imam Bonjol Stabat
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jln. Khairil Anwar No 2 Stabat
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jln. T. Putra Aziz No. 3 Stabat
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jln. Kartini No. 11 Stabat
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jln. Imam Bonjol No. 62 Stabat
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jln. Imam Bonjol Stabat
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jln. Kartini No. 5 Stabat
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jln. Pattimura No. 3 Stabat
22	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Jln. T. Amir Hamzah Stabat
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jln. Khairil Anwar Stabat
24	Badan Pendapatan Daerah	Jln. Imam Bonjol No. 1 Stabat
25	Badan Kepegawaian Daerah	Jln. Perintis Kemerdekaan No. 5 Stabat
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Jln. Imam Bonjol No. 59 Stabat

<b>No.</b>	<b>SKPD</b>	<b>Alamat</b>
27	Sekretariat Daerah	Jln. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat
28	Sekretariat DPRD	Jln. T. Amir Hamzah No. 2 Stabat
29	Inspektorat	Jln. Imam Bonjol No. 51 Stabat
30	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura	Jln. Khairil Anwar No. 9 Tanjung Pura
31	Satuan Polisi Pamong Praja	Jln.Kartini No.1 Stabat
32	Kecamatan Bahorok	Jln Berdikari No. 37 Bahorok
33	Kecamatan Salapian	Jln. Binjai-Bahorok Km. 53,3 Minta Kasih
34	Kecamatan Kuala	Jln. Kuala-Binjai No. 124
35	Kecamatan Selesai	Jln. Binjai No. 2A Selesai
36	Kecamatan Sei Bingai	Namu Ukur Pekan No. 10
37	Kecamatan Binjai	Jln. Ahmad Yani No. 5 Kwala Begumit
38	Kecamatan Stabat	Jln. K.H. Zainal Arifin No. 17 Stabat
39	Kecamatan Wampu	Jln. TM. Daud No. 1 Bingai
40	Kecamatan Secanggang	Jln. Hinai Kiri No. 4 Secanggang
41	Kecamatan Hinai	Jln. Medan-Tanjung Pura Km. 52
42	Kecamatan Tanjung Pura	Jln. T. Amir Hamzah No. 7 Tanjung Pura
43	Kecamatan Gebang	Jln. Sudirman No. 7 Gebang
44	Kecamatan Babalan	Jln. Arnan/Datuk No. I Pangkalan Berandan
45	Kecamatan Berandan Barat	Jln. Medan-Besitang Kel. Tangkahan Durian
46	Kecamatan Sei Lapan	Jln. Besitang - T. Lagan
47	Kecamatan Pangkalan Susu	Jln. Ksatria No. 3 Pkl. Susu
48	Kecamatan Besitang	Jln. Jend. Sudirman No. 205 Besitang
49	Kecamatan Padang Tualang	Jln. Tanjung Pura-Batang Serangan No. 80
50	Kecamatan Sawit Seberang	Jln. Raya No. 1 Sawit Seberang
51	Kecamatan Batang Serangan	Jln. Merdeka No. 1 Batang Serangan
52	Kecamatan Kutambaru	Jln. Marike No. 1 Kutambaru
53	Kecamatan Pematang Jaya	Jln. Mekar Jaya No. 1 Limau Mungkur
54	Kecamatan Sirapit	Jln. Jamin Ginting, Sirapit

## **2. Tingkat Penyebaran Kuesioner**

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan SAP, kompetensi SDM, penerapan SPIP, pemanfaatan TI, dan Pengelolaan BMD terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemkab Langkat.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada responden. Dari jumlah sampel sebanyak 98 kuesioner dapat kembali. Dengan demikian sebanyak 98 kuesioner saja yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Berikut adalah perincian mengenai pendistribusian dan pengembalian kuesioner.

**Tabel 4.2**  
**Data Distribusi Sample Penelitian**

No	Keterangan	Kuesioner yang disebar	Kuesioner yang kembali	Jumlah
1	SKPD PemKab Langkat	31	31	31
2	Instrumen	98	98	98

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Table 4.2 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner penelitian yang disebar kepada responden sebanyak 98 kuesioner, semua kuesioner yang disebar dikembalikan. Oleh karena itu data yang bisa diperoleh sebanyak 98 dengan presentase 100%.

### 3. Demografi Responden

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner yang diterima dapat diketahui karakteristik responden yang akan dibahas dibawah ini meliputi: jenis kelamin, usia dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

**Tabel 4.3**  
**Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jumlah Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	67	68%
Perempuan	31	32%
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jenis kelamin yang menjadi responden lebih didominasi oleh laki-laki sebanyak 67 orang atau 68%, sedangkan perempuan sebanyak 31 orang atau 32%.

2. Data Responden Berdasarkan Usia. Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.4

**Tabel 4.4**  
**Data Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah Responden	Persentase
25-30	15	15%
31-35	40	41%
> 40	43	44%
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Tabel 4.4 menunjukan bahwa responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 15 orang sebesar 15%, usia 31-35 tahun sebanyak 40 orang sebesar 41%, usia > 40 tahun sebanyak 43 orang sebesar 44%.

#### 4. Deskripsi Data Penelitian

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2009) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

**Tabel 4.5**  
**Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden**

Interval Skala	Kategori
1,00 – 1,80	Tidak Baik/Tidak Pernah/Tidak Memadai
1,81 – 2,61	Kurang Baik/Jarang/Kurang Memadai
2,62 – 3,42	Cukup Baik/Kadang Kadang/Cukup Memadai
3,43 – 4,23	Baik/Sering/Memadai
4,24 – 5,04	Sangat Baik/Sangat Sering/Sangat Memadai

Setelah diperoleh kategorisasi rata-rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas tanggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**A. Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Dalam penelitian ini, variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan 4 indikator antara lain 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu:

1. TB : Tidak Baik
2. KB : Kurang Baik
3. CB : Cukup Baik
4. B : Baik
5. SB : Sangat Baik

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel kualitas laporan keuangan yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden**  
**Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
		SB	CB	B	KB	TB				
<b>A</b>	<b>Relevan</b>									
1	Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan SAP	f	32	36	17	8	5	98	3,84	Baik
		%	32,65	36,73	17,35	8,16	5,10	100		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SB	CB	B	KB				TB
2	Laporan keuangan disusun dan disajikan secara lengkap dan tepat waktu, dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini, mengevaluasi keputusan penggunaan dimasa lalu serta dapat digunakan untuk memperkirakan aktivitas keuangan pada periode berikutnya.	f	22	47	20	8	1	98	3,83	Baik
		%	22,45	47,96	20,41	8,16	1,02	100		
<b>B Andal</b>										
3	Informasi dalam laporan keuangan telah menggambarkan seluruh transaksi dan peristiwa lainnya secara jujur dan wajar, dapat diuji, serta bila dilakukan pengujian oleh pihak lain akan menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda.	f	27	36	20	13	2	98	3,74	Baik
		%	27,55	36,73	20,41	13,27	2,04	100		
4	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang sifatnya material.	f	40	35	13	9	1	98	4,06	Baik
		%	40,82	35,71	13,27	9,18	1,02	100		
5	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan semua pengguna laporan dan tidak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pihak tertentu.	f	29	36	27	3	3	98	3,87	Baik
		%	29,59	36,73	27,55	3,06	3,06	100		
<b>C Dapat dibandingkan</b>										
6	Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas	f	27	37	27	6	1	98	3,85	Baik
		%	27,55	37,76	27,55	6,12	1,02	100		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
		SB	CB	B	KB	TB				
	pelaporan lainnya									
<b>D</b>	<b>Dapat dipahami</b>									
7	Laporan Keuangan disusun secara sistematis dan dengan istilah yang mudah dimengerti, sehingga mudah dipahami oleh pengguna.	f	32	35	27	4	0	98	3,97	Baik
		%	32,65	35,71	27,55	4,08	0,00	100		
<b>Rata-Rata Skor</b>								<b>3,88</b>	<b>Baik</b>	

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai item pernyataan tertinggi terdapat pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang sifatnya material. dengan total skor jawaban sebesar 40 responden (40,82%), hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemkab Langkat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang sifatnya material.

#### **B. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)**

Dalam penelitian ini, variabel penerapan SAP diukur dengan 3 indikator antara lain 1) Basis Akuntansi Yang digunakan, 2) Komponen Laporan Keuangan, 3) Periode Pelaporan, Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu:

1. TP : Tidak Pernah
2. JR : Jarang
3. KK : Kadang Kadang
4. S : Sering
5. SS : Sangat Sering

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel penerapan SAP yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden**  
**Variabel Penerapan SAP**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Jumlah	Rata-rata	Kategori
			SS	S	KK	JR	TP			
<b>A</b>	<b>Basis Akuntansi Yang digunakan</b>									
1	Laporan Keuangan Pemkab Langkat disusun dan disajikan berdasarkan SAP dan tertuang dalam Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemda.	f	47	26	16	8	1	98	4,12	Sering
		%	47,96	26,53	16,33	8,16	1,02	100		
2	Pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual sedangkan pengakuan pendapatan-Lra, belanja dan pembiayaan menggunakan serta basis kas.	f	66	22	8	2	0	98	4,55	Sangat Sering
		%	67,35	22,45	8,16	2,04	0,00	100		
<b>B</b>	<b>Komponen Laporan Keuangan</b>									
3	Anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA), disusun berdasarkan basis kas.	f	36	36	21	4	1	98	4,04	Sering
		%	36,73	36,73	21,43	4,08	1,02	100		
4	Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan Belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.	f	50	26	15	5	2	98	4,19	Sering
		%	51,02	26,53	15,31	5,10	2,04	100		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SS	S	KK	JR				TP
5	Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	f	53	31	11	2	1	98	4,36	Sangat Sering
		%	54,08	31,63	11,22	2,04	1,02	100		
6	Laporan Operasional (LO) disusun untuk mengetahui kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.	f	40	35	17	5	1	98	4,10	Sering
		%	40,82	35,71	17,35	5,10	1,02	100		
7	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	f	46	31	17	4	0	98	4,21	Sering
		%	46,94	31,63	17,35	4,08	0,00	100		
8	Neraca mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dan disajikan dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya.	f	50	23	21	3	1	98	4,20	Sering
		%	51,02	23,47	21,43	3,06	1,02	100		
9	Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan dan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama	f	45	24	16	9	4	98	3,99	Sering
		%	45,92	24,49	16,33	9,18	4,08	100		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SS	S	KK	JR				TP
	satu periode akuntansi.									
<b>C</b>	<b>Periode Pelaporan</b>									
10	Laporan keuangan sekurang-kurangnya disusun dan disajikan sekali dalam satu tahun.	f	60	21	11	6	0	98	4,38	Sangat Sering
		%	61,22	21,43	11,22	6,12	0,00	100		
<b>Rata-Rata Skor</b>								<b>4,22</b>	<b>Sering</b>	

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata responden menjawab Sering dengan rata-rata reponden sebesar 4,22, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun SKPD sebagai entitas akuntansi sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan tabel diatas nilai skor tertinggi sebesar 66 (67%) repondeen menjawab sangat sering dengan item pernyataan pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual sedangkan pengakuan pendapatan-Lra, belanja dan pembiayaan menggunakan serta basis kas.

### C. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)

Dalam penelitian ini, variabel kompetensi SDM diukur dengan 3 indikator antara lain 1) Pendidikan, 2) Pelatihan, dan 3) Pengalaman. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu:

1. TM : Tidak Memadai
2. KM : Kurang Memadai
3. CM : Cukup Memadai
4. M : Memadai
5. SM : Sangat Memadai

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel kapasitas SDM yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden**  
**Variabel Kapasitas SDM**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SM	M	CM	KM				TM
<b>A Pendidikan</b>										
1	Saya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, minimal D3 akuntansi.	f	18	17	0	45	18	98	2,71	Tidak Memadai
		%	18,37	17,35	0,00	45,92	18,37	100		
2	Saya cukup memahami SAP, serta memahami siklus akuntansi.	f	53	22	19	3	1	98	4,26	Memadai
		%	54,08	22,45	19,39	3,06	1,02	100		
<b>B Pelatihan</b>										
3	Saya telah mendapatkan bimbingan dan pelatihan, baik terkait pengelolaan keuangan daerah secara umum maupun pelatihan khusus terkait akuntansi pemerintahan.	f	52	29	14	1	2	98	4,31	Sangat Memadai
		%	53,06	29,59	14,29	1,02	2,04	100		
4	Materi bimbingan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan mendukung tugas saya, setelah mengikuti bimbingan dan pelatihan saya mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	f	48	26	19	5	0	98	4,19	Memadai
		%	48,98	26,53	19,39	5,10	0,00	100		
<b>C Pengalaman</b>										
5	Saya memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang akuntansi sehingga membantu saya dalam melaksanakan tugas terutama dapat mengurangi kesalahan dalam menjalankan proses akuntansi.	f	42	34	20	1	1	98	4,17	Memadai
		%	42,86	34,69	20,41	1,02	1,02	100		
<b>Rata-Rata Skor</b>								<b>3,93</b>	<b>Memadai</b>	

Sumber: Data diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,93 dengan kriteria memadai, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM di Pemkab Langkat para ASN dapat memahami dan menguasai pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan akuntansi.

#### D. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP (X3)

Dalam penelitian ini, variabel penerapan SPIP diukur dengan 5 indikator antara lain 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penilaian Resiko, 3) Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, 5) Pemantauan, Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu

1. TB : Tidak Baik
2. KB : Kurang Baik
3. CB : Cukup Baik
4. B : Baik
5. SB : Sangat Baik

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel penerapan SPIP yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden**  
**Variabel Penerapan SPIP**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SB	B	CB	KB				TB
A	<b>Lingkungan pengendalian</b>									
1	Pimpinan telah menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai serta menyusun standar kompetensi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.	f	51	25	17	3	2	98	4,22	Baik
		%	52,04	25,51	17,35	3,06	2,04	100		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Jumlah	Rata-rata	Kategori
			SB	B	CB	KB	TB			
2	Pimpinan selalu mempertimbangkan resiko dalam setiap pengambilan keputusan.	f	54	25	15	3	1	98	4,31	Sangat Baik
		%	55,10	25,51	15,31	3,06	1,02	100		
3	Dalam pendelegasian wewenang, pimpinan memperhatikan tugas dan fungsi serta batasan tanggungjawabnya.	f	51	30	13	2	2	98	4,29	Sangat Baik
		%	52,04	30,61	13,27	2,04	2,04	100		
<b>B Penilaian Resiko</b>										
4	Pimpinan menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko baik yang berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal.	f	53	23	16	5	1	98	4,24	Sangat Baik
		%	54,08	23,47	16,33	5,10	1,02	100		
5	Pimpinan telah melakukan analisis resiko secara lengkap dan menyeluruh untuk mengetahui kemungkinan pelanggaran dan apa dampaknya.	f	48	30	17	2	1	98	4,24	Sangat Baik
		%	48,98	30,61	17,35	2,04	1,02	100		
<b>C Kegiatan Pengendalian</b>										
6	Kebijakan dan prosedur pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang ditetapkan.	f	49	30	14	3	2	98	4,23	Baik
		%	50,00	30,61	14,29	3,06	2,04	100		
7	Pimpinan melakukan evaluasi secara teratur guna memastikan setiap kegiatan sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.	f	49	27	18	2	2	98	4,21	Baik
		%	50,00	27,55	18,37	2,04	2,04	100		
<b>D Informasi dan Komunikasi</b>										
8	Pimpinan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang ada.	f	55	28	12	1	2	98	4,36	Sangat Baik
		%	56,12	28,57	12,24	1,02	2,04	100		
9	Sistem informasi telah digunakan dan terus dikembangkan guna pengelolaan informasi yang lebih baik.	f	53	24	16	4	1	98	4,27	Sangat Baik
		%	54,08	24,49	16,33	4,08	1,02	100		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SB	B	CB	KB				TB
<b>E</b>	<b>Pemantauan</b>									
10	Pimpinan melakukan pemantauan secara berkelanjutan, evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian intern dan jika ditemukan kelemahan diteliti lebih lanjut dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.	f	60	22	13	2	1	98	4,41	Sangat Baik
		%	61,22	22,45	13,27	2,04	1,02	100		
<b>Rata-Rata Skor</b>								<b>4,28</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai item pernyataan tertinggi terdapat pada pimpinan melakukan pemantauan secara berkelanjutan, evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian intern dan jika ditemukan kelemahan diteliti lebih lanjut dan dilaksanakan tindakan perbaikannya dengan total skor jawaban sebesar 60 responden (61%), hal ini menunjukkan bahwa pimpinan di setiap SKPD Kabupaten Langkat sangat sering dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap sistem pengendalian intern dan apabila terjadi kesalahan maka akan dilakukan koreksi atau perbaikan atas sistem pengendalian intern hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik.

#### **E. Pemanfaatan Teknologi Informasi/TI (X4)**

Dalam penelitian ini, variabel Pemanfaatan TI diukur dengan 2 indikator antara lain 1) Pemanfaatan Komputer (Hardware dan Software) dan 2) Jaringan dan Komunikasi, Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu:

1. TP : Tidak Pernah
2. JR : Jarang
3. KK : Kadang Kadang
4. S : Sering
5. SS : Sangat Sering

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Pemanfaatan TI yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden**  
**Variabel Pemanfaatan TI**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SS	S	KK	JR				TP
<b>A</b>	<b>Pemanfaatan Komputer (Hardware dan Software)</b>									
1	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan telah didukung oleh penggunaan komputer.	f	49	28	18	1	2	98	4,23	Sering
		%	50,00	28,57	18,37	1,02	2,04	100		
2	Pelaksanaan siklus akuntansi dari awal transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.	f	58	24	12	3	1	98	4,38	Sangat Sering
		%	59,18	24,49	12,24	3,06	1,02	100		
3	Terdapat anggaran pemeliharaan dan jadwal pemeliharaan diatur rutin secara berkala.	f	49	26	19	4	0	98	4,22	Sering
		%	50,00	26,53	19,39	4,08	0,00	100		
4	Pengolahan data transaksi keuangan telah menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	f	47	26	19	4	2	98	4,14	Sering
		%	47,96	26,53	19,39	4,08	2,04	100		
<b>B</b>	<b>Jaringan dan Komunikasi</b>									
5	Jaringan internet terhubung dengan	f	46	28	17	2	5	98		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SS	S	KK	JR				TP
	setiap unit kerja yang ada, dan dijadikan sarana untuk mengirimkan dan informasi yang dibutuhkan.	%	46,94	28,57	17,35	2,04	5,10	100	4,10	Sering
6	Laporan akuntansi telah dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.	f	48	27	19	2	2	98	4,19	Sering
		%	48,98	27,55	19,39	2,04	2,04	100		
<b>Rata-Rata Skor</b>								<b>4,21</b>	<b>Sering</b>	

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai item pernyataan tertinggi terdapat pada pernyataan pelaksanaan siklus akuntansi dari awal transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. dengan total skor jawaban sebesar 58 responden (59%), hal ini menunjukkan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan sudah memadai karena setiap pencatatan dan pembuatan laporan keuangan sudah terkomputerisasi dengan baik sehingga data-data yang tersimpan dalam komputer terusun secara sistematis dan mudah untuk mengevaluasinya.

#### **F. Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD (X5)**

Dalam penelitian ini, variabel pengelolaan BMD diukur dengan 11 indikator antara lain 1) Perencanaan dan Penganggaran, 2) Pengadaan, 3) Penggunaan, 4) Pemanfaatan, 5) Pengamanan dan Pemeliharaan, 6) Penilaian, 7) Pemindahtanganan, 8) Pemusnahan, 9) Penghapusan, 10) Penatausahaan, 11) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu:

1. TP : Tidak Pernah
2. JR : Jarang
3. KK : Kadang Kadang
4. S : Sering
5. SS : Sangat Sering

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel pengelolaan BMD yang dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden**  
**Variabel Pengelolaan BMD (X5)**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SS	S	KK	JR				TP
<b>A</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran</b>									
1	Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.	f	53	30	12	1	2	98	4,34	Sangat Sering
		%	54,08	30,61	12,24	1,02	2,04	100		
2	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) disusun setiap tahun dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.	f	39	20	29	4	6	98	3,84	Sering
		%	39,80	20,41	29,59	4,08	6,12	100		
<b>B</b>	<b>Pengadaan</b>									
3	Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dan hasilnya dilaporkan kepada pengelola BMD untuk ditetapkan status penggunaannya.	f	42	29	19	4	4	98	4,03	Sering
		%	42,86	29,59	19,39	4,08	4,08	100		
4	Laporan hasil pengadaan BMD	f	32	20	19	12	15	98		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
			SS	S	KK	JR				TP
	di laporkan baik secara bulanan, semesteran dan tahunan.	%	32,65	20,41	19,39	12,24	15,31	100	3,43	Sering
<b>C</b>	<b>Penggunaan</b>									
5	Penetapan status penggunaan BMD dilaksanakan secara tahunan, dan tidak dilakukan terhadap persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), barang yang akan dihibahkan, dan Aset Tetap Renovasi (ATR).	f	45	22	27	2	2	98	4,08	Sering
		%	45,92	22,45	27,55	2,04	2,04	100		
6	Pengalihan status penggunaan BMD ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang berdasarkan persetujuan atau keputusan Bupati	f	24	30	29	11	4	98	3,60	Sering
		%	24,49	30,61	29,59	11,22	4,08	100		
<b>D</b>	<b>Pemanfaatan</b>									
7	Pemanfaatan BMD selalu berdasarkan persetujuan Bupati ataupun persetujuan Pengelola Barang.	f	35	32	22	7	2	98	3,93	Sering
		%	35,71	32,65	22,45	7,14	2,04	100		
8	Pendapatan dari Pemanfaatan BMD untuk pelayanan umum sesuai fungsi BLUD disetorkan ke Kas BLUD dan selain untuk penyelenggaraan sesuai dengan fungsi BLUD disetorkan ke RKUD.	f	50	24	20	3	1	98	4,21	Sering
		%	51,02	24,49	20,41	3,06	1,02	100		
<b>E</b>	<b>Pengamanan dan Pemeliharaan</b>									
9	Pengamanan yang dilakukan terhadap BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.	f	53	24	18	2	1	98	4,29	Sangat Sering
		%	54,08	24,49	18,37	2,04	1,02	100		
10	Pengguna barang menyusun laporan pemeliharaan secara berkala	f	50	24	20	2	2	98	4,20	Sering
		%	51,02	24,49	20,41	2,04	2,04	100		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
		SS	S	KK	JR	TP				
	setiap enam bulan/per semesteran serta melaporkan kepada pengelola barang.									
<b>F</b>	<b>Penilaian</b>									
11	Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemda, pemanfaatan atau pemindahtanganan dan berpedoman pada SAP.	f	48	31	16	2	1	98	4,26	Sangat Sering
		%	48,98	31,63	16,33	2,04	1,02	100		
12	Penilaian kembali BMD (revaluasi) dalam rangka pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan berpedoman pada SAP dan penilaiannya menggunakan standar penilaian.	f	41	32	17	7	1	98	4,07	Sering
		%	41,84	32,65	17,35	7,14	1,02	100		
<b>G</b>	<b>Pemindahtanganan</b>									
13	Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar kecuali pemindahtanganan dalam bentuk hibah.	f	42	35	16	3	2	98	4,14	Sering
		%	42,86	35,71	16,33	3,06	2,04	100		
14	Pemindahtanganan BMD dilakukan setelah mendapat persetujuan, baik persetujuan Bupati atau pun persetujuan DPRD.	f	33	17	26	13	9	98	3,53	Sering
		%	33,67	17,35	26,53	13,27	9,18	100		
15	Pemindahtanganan BMD dalam bentuk Penyertaan Modal pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).	f	38	41	11	7	1	98	4,10	Sering
		%	38,78	41,84	11,22	7,14	1,02	100		
<b>H</b>	<b>Pemusnahan</b>									
16	Pemusnahan BMD dilakukan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati serta dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pemusnahan,	f	24	39	31	4	0	98	3,85	Sering
		%	24,49	39,80	31,63	4,08	0,00	100		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori	
		SS	S	KK	JR	TP				
	sedang BA pemusnahan dijadikan dasar pengusulan penghapusan BMD.									
<b>I</b>	<b>Penghapusan</b>									
17	Penghapusan BMD dilakukan setelah disetujui oleh Bupati untuk kemudian diterbitkan Keputusan penghapusan oleh Bupati.	f	30	42	17	8	1	98	3,94	Sering
		%	30,61	42,86	17,35	8,16	1,02	100		
<b>J</b>	<b>Penatausahaan</b>									
18	Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.	f	33	39	18	7	1	98	3,98	Sering
		%	33,67	39,80	18,37	7,14	1,02	100		
19	Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	f	28	47	15	3	5	98	3,92	Sering
		%	28,57	47,96	15,31	3,06	5,10	100		
<b>K</b>	<b>Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian</b>									
20	Bupati melakukan pembinaan pengelolaan BMD dengan menetapkan Perda tentang pengelolaan BMD.	f	33	39	18	7	1	98	3,98	Sering
		%	33,67	39,80	18,37	7,14	1,02	100		
21	Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD dan jika ditemukan pelanggaran dapat	f	28	47	15	3	5	98	3,92	Sering
		%	28,57	47,96	15,31	3,06	5,10	100		

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Jumlah	Rata-rata	Kategori
		SS	S	KK	JR	TP			
	meminta aparat pengawas intern untuk melakukan audit.								
<b>Rata-Rata Skor</b>								<b>3,98</b>	<b>Sering</b>

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai item pernyataan tertinggi terdapat pada pernyataan perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga dengan total skor jawaban sebesar 50 responden (51%), hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam menyusun kebutuhan BMD sesuai dengan standar harga, sehingga transparansi yang ditunjukkan dalam penentuan harga sudah sangat jelas dan bertujuan untuk mendapatkan laporan keuangan yang handal.

## 5. Hasil Pengujian SEM PLS

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap kualitas data yang digunakan. Pengujian ini digunakan untuk menjamin terpenuhinya asumsi yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap penelitian ini.

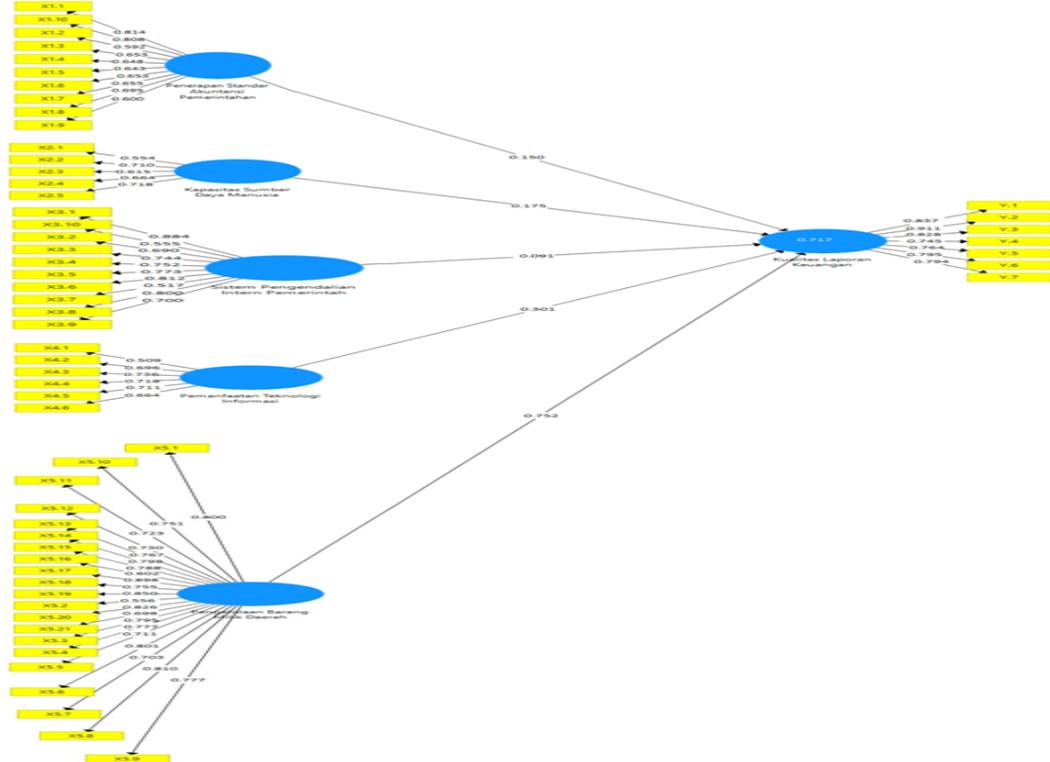
### 5.1 Analisis *Outer Model*

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan 2 tahap untuk menilai fit model dari sebuah model penelitian (Ghozali). Salah satunya adalah analisis *outer model*. Analisis *outer model* digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis *outer model*, diantaranya *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

a. *Convergent Validity*

Convergent validity merupakan pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor kontruknya atau melalui *loading factor* pada masing-masing indikator konstruk. Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai *convergent validity* layak/terpenuhi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *rule of thumb*, dimana nilai *loading factor* lebih besar dari 0,60 - 0,70, namun dapat juga diterima rentang *loading factor* lebih besar dari 0,50 - 0,60 (Ghozali dan Latan, 2012:74). Berdasarkan hasil analisis data pada *convergent validity*, pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk dari *convergent validity* melalui *loading factor* dapat juga dikemukakan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Diolah oleh penulis, 2021

**Gambar 4.1 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS**

Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.00 dapat dilihat pada gambar 4.1 nilai *outer model* antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi *convergent validity* karena indikator memiliki nilai validitas diatas 0,5.

b. *Discriminant Validity*

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji *discriminant validity*. Uji *discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya (ghozali). Berikut adalah nilai *cross loading* pada masing-masing indikator:

**Tabel 4.12**  
***Cross Loading***

	<b>Penerapan SAP</b>	<b>Kapasitas SDM</b>	<b>SPI</b>	<b>Penerapan TI</b>	<b>Pengelolaan BMD</b>	<b>Kualitas Laporan keuangan</b>
X1.1	0,814	0,676	0,640	0,667	0,538	0,493
X1.10	0,808	0,635	0,657	0,587	0,647	0,570
X1.2	0,592	0,437	0,545	0,420	0,562	0,470
X1.3	0,653	0,639	0,619	0,647	0,451	0,607
X1.4	0,648	0,566	0,582	0,622	0,580	0,551
X1.5	0,643	0,504	0,549	0,591	0,472	0,467
X1.6	0,653	0,650	0,594	0,357	0,362	0,611
X1.7	0,655	0,617	0,616	0,550	0,497	0,498
X1.8	0,695	0,546	0,676	0,640	0,667	0,664
X1.9	0,600	0,560	0,488	0,233	0,139	0,133
X2.1	0,049	0,554	0,491	0,018	0,193	0,312
X2.2	0,053	0,710	0,143	0,178	0,190	0,272
X2.3	0,276	0,615	0,151	0,234	0,139	0,077
X2.4	0,364	0,664	0,613	0,598	0,538	0,493
X2.5	0,615	0,718	0,645	0,677	0,547	0,570
X3.1	0,653	0,548	0,884	0,562	0,522	0,515
X3.2	0,305	0,305	0,690	0,530	0,349	0,355
X3.3	0,621	0,614	0,744	0,272	0,416	0,437
X3.4	0,562	0,716	0,752	0,416	0,488	0,233
X3.5	0,648	0,761	0,773	0,481	0,606	0,647
X3.6	0,585	0,736	0,812	0,416	0,295	0,736
X3.7	0,476	0,402	0,517	0,403	0,233	0,478
X3.8	0,611	0,619	0,800	0,189	0,132	0,253
X3.9	0,485	0,612	0,700	0,370	0,105	0,632
X3.10	0,465	0,522	0,555	0,412	0,491	0,082

	Penerapan SAP	Kapasitas SDM	SPI	Penerapan TI	Pengelolaan BMD	Kualitas Laporan keuangan
X4.1	0,474	0,487	0,429	0,509	0,447	0,044
X4.2	0,587	0,070	0,487	0,696	0,640	0,509
X4.3	0,502	0,565	0,493	0,736	0,485	0,520
X4.4	0,609	0,512	0,570	0,718	0,565	0,559
X4.5	0,664	0,529	0,470	0,711	0,588	0,562
X4.6	0,658	0,562	0,597	0,664	0,574	0,584
X5.1	0,649	0,530	0,551	0,538	0,800	0,653
X5.2	0,453	0,272	0,467	0,447	0,556	0,405
X5.3	0,548	0,416	0,611	0,562	0,795	0,621
X5.4	0,624	0,481	0,498	0,451	0,777	0,562
X5.5	0,447	0,416	0,664	0,580	0,711	0,648
X5.6	0,746	0,503	0,312	0,472	0,801	0,585
X5.7	0,498	0,424	0,272	0,662	0,703	0,676
X5.8	0,617	0,569	0,077	0,497	0,810	0,611
X5.9	0,773	0,522	0,493	0,667	0,777	0,485
X5.10	0,706	0,449	0,570	0,193	0,751	0,565
X5.11	0,540	0,416	0,515	0,190	0,723	0,588
X5.12	0,560	0,488	0,233	0,139	0,730	0,674
X5.13	0,730	0,606	0,647	0,538	0,767	0,502
X5.14	0,513	0,295	0,736	0,547	0,798	0,609
X5.15	0,627	0,233	0,578	0,522	0,788	0,664
X5.16	0,501	0,248	0,253	0,549	0,602	0,558
X5.17	0,522	0,038	0,632	0,416	0,898	0,030
X5.18	0,682	0,015	0,542	0,653	0,775	0,078
X5.19	0,651	0,013	0,565	0,692	0,850	0,031
X5.20	0,607	0,690	0,759	0,489	0,826	0,101
X5.21	0,578	0,502	0,565	0,485	0,698	0,520
Y.1	0,538	0,493	0,688	0,741	0,585	0,837
Y.2	0,647	0,570	0,687	0,768	0,664	0,911
Y.3	0,562	0,470	0,607	0,739	0,746	0,828
Y.4	0,451	0,697	0,664	0,656	0,568	0,745
Y.5	0,580	0,551	0,685	0,811	0,655	0,764
Y.6	0,472	0,467	0,657	0,729	0,666	0,795
Y.7	0,662	0,611	0,625	0,772	0,653	0,794

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data Tabel 4.12 diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-

indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

Selain mengamati nilai cross loading, *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *Average Variant Extracted* (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik (ghozali,2017)

**Tabel 4.13**  
*Average Variated Extracted (AVE)*

Variabel	(AVE)
Penerapan SAP	0.888
Kapasitas SDM	0.838
SPIP	0.797
Pemanfaatan TI	0.860
Pengelolaan Barang Milik Daerah	0.706
Kualitas Laporan keuangan	0.660

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui nilai AVE variabel penerapan SAP, Kapasitas SDM, penerapan SPIP, Pemanfaatan TI, pengelolaan BMD dan kualitas laporan keuangan > 0,5, maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

c. *Composite Reliability*

*Composite reliability* merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0,6 (ghozali,2017). Berikut nilai *composite reliability* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 4.14**  
***Composite Reliability***

Variabel	Composite Reliability
Penerapan SAP	0.939
Kapasitas SDM	0.888
SPIP	0.921
Pemanfaatan TI	0.924
Pengelolaan BMD	0.923
Kualitas Laporan keuangan	0.931

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian  $> 0,6$ . Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

d. *Cronbach's Alpha*

Uji reliabilitas dengan *composite reliability* sebelumnya dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach's alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha*  $> 0,7$ . Berikut adalah nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel

**Tabel 4.15**  
***Cronbach Alpha***

Variabel	Cronbach's Alpha
Penerapan SAP	0.900
Kapasitas SDM	0.827
SPIP	0.900
Pemanfaatan TI	0.858
Pengelolaan BMD	0.894
Kualitas Laporan keuangan	0.913

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel penelitian  $> 0,7$ . Maka hasil ini menunjukkan masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan reliabilitas yang tinggi.

e. *Estimation Weight*

*Estimation weight* menunjukkan bahwa pengukuran formatif antar variabel harus memiliki nilai signifikan. Nilai signifikansi variabel biasanya  $< 0,05$  namun, pada signifikansi nilai *weight* memperbolehkan nilai  $< 0,2$  (ghozali:43)

**Tabel 4.16**  
*Estimation Weight*

Variabel	<i>P Values</i>
Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,004
Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	0,000
SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,000
Pemanfaatan TI -> Kualitas Laporan Keuangan	0,000
Pengelolaan BMD -> Kualitas Laporan Keuangan	0,000

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Pada Tabel 4.16 dinyatakan bahwa nilai Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan sebesar adalah 0,004 dengan *estimation weight* minimal nilai *probability*  $< 0,2$  maka variabel penelitian ini memiliki nilai estimasi model pengukuran formatif yang signifikan

## 5.2 Analisa Inner Model

Setelah memenuhi kriteria *outer model*, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural (*inner model*). Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai uji *goodness of fit*.

### 6.2.1. Uji Path Coefficient

Evaluasi path coefficient digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Berdasarkan gambar 4.19 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS menjelaskan bahwa nilai *path coefficient* variabel Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan sebesar 2.896, Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan 4.574, SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan 2.888. Pemanfaatan TI -> Kualitas Laporan Keuangan 4.886,

Pengelolaan BMD -> Kualitas Laporan Keuangan 14.809. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa variabel dalam model ini faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan menunjukkan arah yang positif.

**Tabel 4.17**  
**Path Coefficient**

Variabel	Coefficient	T Value
Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,150	2.896
Kapasitas SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	0,175	4.574
SPIP-> Kualitas Laporan Keuangan	0,091	2.888
Pemanfaatan TI -> Kualitas Laporan Keuangan	0,301	4.886
Pengelolaan BMD -> Kualitas Laporan Keuangan	0,752	14.809

#### 6.2.2. Uji Goodness of Fit

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan program SmartPLS

3.0 diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**R-Square**

Variabel	R Square
Kualitas Laporan Keuangan	0.717

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Variabel	Coefficient	Coefficient <sup>2</sup>	R
Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,150	0,0225	2,25
Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	0,175	0,030625	3,0625
SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,091	0,008281	0,8281
Pemanfaatan TI -> Kualitas Laporan Keuangan	0,301	0,090601	9,0601
Pengelolaan BMD -> Kualitas Laporan Keuangan	0,752	0,565504	56,5504
<b>Total</b>		<b>0,717</b>	<b>71,7</b>

Pada Tabel 4.18 nilai *R-Square* yang diperoleh adalah 0.717 untuk variabel kualitas laporan keuangan. nilai tersebut menginterpretasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan hanya mampu menjelaskan varian kualitas laporan keuangan sekitar 71,7%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

### 6.2.3. F-Square

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang di pengaruhi (endogen). Perubahan nilai R<sup>2</sup> saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi,2018). Kriteria F-Square menurut (Juliandi,2018) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai F<sup>2</sup> = 0.02 berarti efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.
- 2) Jika nilai F<sup>2</sup> = 0.15 berarti efek yang sedang/berat dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.
- 3) Jika nilai F<sup>2</sup> = 0.35 berarti efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

**Tabel 4.19**  
***R-Square***

Variabel	Penerapan SAP	Kualitas Laporan Keuangan	Kapasitas SDM	SPIP	Pemanfaatan TI	Pengelolaan BMD
Penerapan SAP		1.125				
Kapasitas SDM		1.230				
SPIP		1.175				
Pemanfaatan TI		1.311				
Pengelolaan BMD		1.552				

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dengan Aplikasi SmartPLS

Kesimpulan dari pengujian F-Square pada tabel di atas adalah variabel penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan memiliki nilai  $F_2 = 1.125$ . Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan memiliki nilai  $F_2 = 1.230$ . Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel SPIP terhadap kualitas laporan keuangan memiliki nilai  $F_2 = 1.175$ . Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel pemanfaat TI terhadap kualitas laporan keuangan memiliki nilai  $F_2 = 1.311$ . Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel pengelolaan BMD terhadap kualitas laporan keuangan memiliki nilai  $F_2 = 1.552$ . Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

**a) *Dirrect Effect***

Tujuan analisis dirrect effect (pengaruh langsung) berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi,2018). Nilai probabilitas/signifikansi (P-Value):

- Jika nilai P-Value < 0.05, maka signifikan.
- Jika nilai P-Value > 0.05, maka tidak signifikan.

**Tabel 4.20**  
***Dirrect Effect***

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,072	0,658	0,148	2,896	0,004
Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	0,134	0,338	0,261	4,574	0,000
SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,071	0,134	0,164	2,888	0,000

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Pemanfaatan TI -> Kualitas Laporan Keuangan	0,157	0,014	0,229	4,886	0,000
Pengelolaan BMD -> Kualitas Laporan Keuangan	0,778	0,115	0,085	14,809	0,000

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dengan Aplikasi SmartPLS

Kesimpulan dari nilai direct effect pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.072 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Variabel Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.134 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Variabel SPIP-> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.071 dan P-Value 0.000 (>0.05), artinya memiliki sistem pegendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Variabel Pemanfaatan TI -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.157 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- 5) Variabel Pengelolaan BMD -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.778 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## 7. Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat *t-statistic* dan nilai *p-value*. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila *t-statistic* > 1,98 (Lampiran 5) dan *P-Value* < 0,05. Berikut ini adalah hasil pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS versi 3.0:

**Tabel 4.21**  
**T-Statistics dan P-Values**

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,072	0,658	0,148	2,896	0,004
Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	0,134	0,338	0,261	4,574	0,000
SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,071	0,134	0,164	2,888	0,000
Pemanfaatan TI -> Kualitas Laporan Keuangan	0,157	0,014	0,229	4,886	0,000
Pengelolaan BMD -> Kualitas Laporan Keuangan	0,778	0,115	0,085	14,809	0,000

Sumber: Data diolah penulis, 2021

- 1) Variabel Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.072 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Variabel Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.134 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- 3) Variabel SPIP-> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.071 dan P-Value 0.000 ( $>0.05$ ), artinya memiliki sistem peggendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Variabel Pemanfaatan TI -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.157 dan P-Value 0.000 ( $<0.05$ ), artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 5) Variabel Pengelolaan BMD -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.778 dan P-Value 0.000 ( $<0.05$ ), artinya Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## **B. Pembahasan Penelitian**

Setelah dilakukan pengujian pada hasil penelitian, kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil penelitian sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan nilai Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.072 dan P-Value 0.000 ( $<0.05$ ), artinya penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah yang positif, maka hipotesis pertama “diterima”.

Berdasarkan hasil *cross loading* maka terdapat item pernyataan yang memiliki nilai terendah untuk variabel penerapan SAP yaitu terdapat pada item pernyataan X1.2 dengan pernyataan Pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual sedangkan pengakuan pendapatan-Lra, belanja dan pembiayaan menggunakan serta basis kas dan item

pernyataan ini termasuk kedalam indikator basis akuntansi yang digunakan dengan nilai cross loading sebesar 0.592, hal ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada latar belakang masalah yaitu dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan penyajian akun pada laporan keuangan Pemkab Langkat dalam hal ini tidak disajikannya beban persediaan dalam LO sebagaimana dapat dilihat pada LHP BPK Nomor: 35.B.LHP/XVIII.MDN/05/2016 dan LHP Nomor: 46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2017 yang dinyatakan Pemkab Langkat belum dapat menyajikan beban persediaan sesuai dengan Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUN/RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUN/RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUN/RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUN/RKUD. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Sedangkan nilai cross loading tertinggi pada variabel penerapan SAP terdapat pada indikator basis akuntansi yang digunakan dengan item pernyataan dengan nilai cross loading sebesar 0,814 Laporan Keuangan Pemkab Langkat

disusun dan disajikan berdasarkan SAP dan tertuang dalam Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Langkat telah menyajikan Laporan keuangan telah mengacu pada SAP. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab Langkat yang telah diaudit dapat bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut, walaupun Pemkab Langkat sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan

Dalam ketentuan umum PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP dinyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang harus dipenuhi yang mengikat secara hukum dan dirancang dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

SAP wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas. SAP dapat dijadikan jembatan untuk menyatukan persepsi antara penyusun dan penyaji, pengguna/stakeholders dan auditor.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, pemerintah harus secara konsisten menerapkan SAP, sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat. Penerapan SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan juga dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan demikian penerapan SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akan berdampak semakin berkualitasnya laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Irwan, 2011), dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (Armando, 2013), menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2013) juga menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (Aryani, 2013), (Saragih, 2007), (Sukmaningrum, 2012), (Mulyani, 2014) membuktikan dalam penelitiannya bahwa Penerapan SAP, Kualitas SDM, SPI, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi secara simultan dan Parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## **2. Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Variabel Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.134 dan P-Value 0.000 ( $<0.05$ ), artinya kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil *cross loading* maka terdapat item pernyataan yang memiliki nilai terendah untuk variabel Kualitas SDM yaitu terdapat pada item pernyataan X2.1 dengan pernyataan Saya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, minimal D3 akuntansi. Item pernyataan ini termasuk kedalam indikator pendidikan yang digunakan dengan nilai *cross loading* sebesar 0.554. Kapasitas SDM di SKPD Pemkab Langkat belum baik hal ini disebabkan oleh Pemkab Langkat belum melakukan analisis kebutuhan SDM terkait pengelolaan keuangan, terutama untuk kasubbag keuangan sebagai PPK SKPD yang mempunyai tugas menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD. Hal ini sesuai dengan LHP

BPK Nomor: 83/LHP/XVIII.MDN/10/2015 dinyatakan bahwa Pemkab Langkat belum melakukan analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, asset dan TI dalam rangka implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual

Sedangkan nilai cross loading tertinggi sebesar 0.718 terdapat pada item pernyataan saya memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang akuntansi sehingga membantu saya dalam melaksanakan tugas terutama dapat mengurangi kesalahan dalam menjalankan proses akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa ASN yang ada di SKPD Kab. Langkat khususnya bagian kasubbag keuangan sebagai PPK SKPD yang mempunyai tugas menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD sudah memiliki pengalaman dalam menyusun laporan keuangan sehingga pada tahun 2019 auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemkab. Langkat

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan mensinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009). Kapasitas SDM adalah kemampuan seseorang/individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kualitas/Kapasitas SDM merupakan kemampuan dari seseorang/individu di dalam suatu organisasi atau kelembagaan maupun di dalam suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenanganyang ada padanya

dalam upaya mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien (Urban, n.d.).

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Kompetensi ini dapat diperoleh baik dari pendidikan maupun dari bimbingan teknis dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai negeri sipil.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, pemerintah membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi dan ketrampilan yang memadai terutama yang memahami akuntansi, pengelolaan keuangan dan peraturan yang berlaku terutama SAP. Dengan adanya SDM yang berkompeten serta mampu memahami logika akuntansi yang baik akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian SDM yang berkualitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wansyah, H., Darwin, & Bakar, 2012), (Sari, Martani, & Setyaningrum, 2015), (Syarifudin, 2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh Kapasitas sumber daya manusia, Nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh teknologi informasi. Nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh kegiatan pengendalian.

### **3. Pengaruh Penerapan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Variabel penerapan SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.071 dan P-Value 0.000 ( $>0.05$ ), artinya memiliki SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil *cross loading* maka terdapat item pernyataan yang memiliki nilai terendah untuk variabel penerapan SPIP yaitu terdapat pada item pernyataan X3.10 dengan pernyataan pimpinan melakukan pemantauan secara berkelanjutan, evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian intern dan jika ditemukan kelemahan diteliti lebih lanjut dan dilaksanakan tindakan perbaikannya. Item pernyataan ini termasuk kedalam indikator pemantauan yang digunakan dengan nilai *cross loading* sebesar 0.554. Dalam hal penerapan SPIP di SKPD Pemkab Langkat belum baik hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang dalam LHP BPK banyak terdapat temuan yang berulang ditahun berikutnya dan dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja tak terduga dan hibah tidak tertib, LHP BPK nomor: 35.B/LHP/XVIII.MDN/05/2016, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Penyimpanan uang tunai dari belanja tidak terduga tidak wajar.
  - b. Belanja hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melebihi nilai maksimal yang ditetapkan dalam peraturan bupati.
2. Dalam LHP BPK nomor: 46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2017, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) belum tertib hal ini dilihat dari masih ada sisa UP yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah (KASDA) pada saat Tahun Anggaran berakhir.
  - b. Terdapat pajak yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada saat Tahun Anggaran berakhir.
  - c. Terdapat klasifikasi penganggaran yang tidak tepat.
3. Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib, LHP BPK nomor: 48.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, diantaranya sebagai berikut:
- a. Terdapat pajak yang belum disetor ke RKUN pada saat Tahun Anggaran berakhir.
  - b. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU) melebihi batas waktu yang disyaratkan, yaitu 1 (satu) bulan.
4. Pengelolaan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyetoran pajak restoran belum tertib, LHP BPK nomor: 59.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, diantaranya sebagai berikut:
- a. Rekening giro dana BOS belum ditetapkan Bupati.
  - b. Penerimaan bunga dari rekening dana BOS terlambat disetorkan ke KASDA.
  - c. Pajak daerah terlambat disetorkan ke KASDA.
5. Dalam LHP BPK nomor: 56.B/LHP/XVIII.MDN/05/2020, diantaranya sebagai berikut:
- a. Klasifikasi penganggaran belanja tidak tepat.
  - b. Pengelolaan belanja hibah dan belanja bansos tidak memadai.

- c. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak didukung usulan calon penerima hibah dan NPHD.

Sedangkan nilai cross loading tertinggi sebesar 0.884 terdapat pada item pernyataan pimpinan telah menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai serta menyusun standar kompetensi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini menunjukkan penempatan ASN di SKPD Kab Langkat sudah sesuai dengan standar kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing ASN sehingga dapat mengerti dan memahami penyusunan laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern/SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP).

Salah satu tujuan dari SPI menurut (Warren. C.S, 2009) adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, kekeliruan dan kesalahan dalam perhitungan dapat diminimalisir. Agar sistem yang dibangun berkualitas, maka setiap bagian dari sistem tersebut harus terintegrasi dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diantara bagian dari sistem yang mempunyai tugas memperlancar jalannya Sistem Informasi Akuntansi adalah pengendalian intern. Laporan

keuangan pemerintah yang berkualitas tidak terlepas dari SPIP yang baik. Dengan meningkatkan kualitas SPIP diharapkan akan sejalan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Irwan, 2011, Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, 2015 dalam penelitiannya menyatakan SPIP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

#### **4. Pengaruh Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Variabel Pemanfaatan TI -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.157 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil cross loading maka terdapat item pernyataan yang memiliki nilai terendah untuk variabel pemanfaatan TI yaitu terdapat pada item pernyataan X4.1 dengan pernyataan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan telah didukung oleh penggunaan komputer. Item pernyataan ini termasuk kedalam indikator Pemanfaatan Komputer (Hardware dan Software) yang digunakan dengan nilai cross loading sebesar 0.509. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu berdasarkan LHP BPK Nomor: 83/LHP/XVIII.MDN/05/2015, LHP BPK-RI Nomor: 35.B.LHP/XVIII.MDN/05/2016 dan LHP Nomor: 46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2017 yang dinyatakan bahwa Aplikasi yang ada pada Pemkab Langkat belum dapat menyajikan beban persediaan sesuai dengan Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Perangkat lunak komputer merupakan sekumpulan rincian instruksi program yang

mengendalikan dan mengkoordinasi perangkat keras komponen komputer di dalam sebuah sistem informasi”. Perangkat lunak (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut dibutuhkan. Pemerintahan daerah akan menyusun laporan keuangan daerah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sedangkan nilai cross loading tertinggi sebesar 0.736 terdapat pada item pernyataan terdapat anggaran pemeliharaan dan jadwal pemeliharaan diatur rutin secara berkala. Hal ini menunjukkan anggaran pemeliharaan dan jadwal pemeliharaan diatur rutin secara berkala.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik terbitlah PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan PP nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa “Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah”.

Dengan keluarnya PP tersebut baik pemerintah pusat maupun daerah wajib memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan sistem kerja yang terintegrasi antar unit

organisasi di pemerintah pusat ataupun antar SKPD di Pemerintah Daerah dan bahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemanfaatan teknologi juga akan menghasilkan informasi keuangan lebih cepat dan akurat serta berkualitas.

Dalam penelitiannya (Yosefrinaldi, 2013) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemda. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wansyah, H., Darwin, & Bakar, 2012) dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan.

## **5. Pengaruh Pengelolaan BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Variabel Pengelolaan BMD -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.778 dan P-Value 0.000 ( $<0.05$ ), artinya Pengelolaan BMD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil cross loading maka terdapat item pernyataan yang memiliki nilai terendah untuk variabel pengelolaan BMD yaitu terdapat pada item pernyataan X5.2 dengan pernyataan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) disusun setiap tahun dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan item pernyataan ini termasuk kedalam indikator Perencanaan dan Penganggaran dengan nilai cross loading sebesar 0.556. Lemahnya pengelolaan BMD pada Pemkab Langkat dapat dilihat dari LHP BPK yang masih terdapat temuan terkait penatausahaan persediaan dan pengelolaan BMD dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset tetap belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. LHP BPK nomor: 35.B/LHP/XVIII/.MDN/05/2016 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Masih terdapat aset yang bernilai Rp0,00 s/d Rp100,00.
  - b. Terdapat aset tanah belum dilengkapi bukti kepemilikan (Sertifikat).
  - c. Terdapat indikasi aset tetap yang belum tercatat.
  - d. Terdapat indikasi aset tetap yang tercatat dua kali.
  - e. Terdapat aset yang tidak dikapitalisasi ke aset induk.
2. Pengelolaan dan penatausahaan persediaan belum tertib serta pengelolaan aset belum memadai. LHP BPK nomor: 46.B/LHP/XVIII/.MDN/05/2017 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Realisasi belanja bahan habis pakai dan belanja material belum dicatatkan dalam kartu persediaan barang.
  - b. Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tidak dilaporkan sebagai mutasi persediaan.
  - c. Belum dapat disajikannya beban persediaan pada LO.
  - d. Penilaian atas tanah di bawah jalan dan bangunan air belum akurat.
  - e. Terdapat aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
  - f. Terdapat aset tetap yang tidak dikapitalisasi ke aset induk.
  - g. Aset tetap yang telah diserahkan kepada pihak lain masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
  - h. Pengamanan terhadap fisik, hukum maupun administrasi aset tetap tanah belum memadai.

3. Pengelolaan aset belum memadai. LHP BPK nomor: 48.B/LHP/XVIII/.MDN/05/2018 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pencatatan jumlah aset dan luas jalan tidak sesuai kondisi sebenarnya.
  - b. Terdapat aset peralatan dan mesin yang dicatat secara gabungan.
  - c. Terdapat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dikapitalisasi ke aset induk.
  - d. Akumulasi penyusutan yang disajikan di Neraca belum menggambarkan nilai yang sewajarnya.
4. Pengelolaan aset kurang memadai. LHP BPK nomor: 59.B/LHP/XVIII/.MDN/05/2019 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Barang persediaan hasil pengadaan untuk kebutuhan rutin dan kegiatan tidak dikelola oleh pengurus barang melainkan langsung didistribusikan ke masing-masing bagian.
  - b. Buku persediaan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran barang persediaan tidak dibuat oleh pengurus barang.
  - c. Kartu persediaan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran barang berdasarkan jenis barang tidak dibuat oleh pengurus barang.
  - d. Terdapat aset tanah dan peralatan mesin yang belum dilengkapi bukti kepemilikan.
  - e. Terdapat aset peralatan mesin yang dicatat gabungan.
  - f. Terdapat aset gedung dan bangunan yang tidak dikapitalisasi ke aset induk.
  - g. Aset tetap lainnya belum dicatat secara rinci per unit aset melainkan masih dicatat gabungan.

5. Penatausahaan persediaan belum tertib dan Pengelolaan BMD belum memadai. LHP BPK nomor: 56.B/LHP/XVIII/.MDN/06/2020. Dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penyajian nilai persediaan belum sesuai dengan kebijakan akuntansi.
  - b. Penatausahaan persediaan tidak tertib dan memadai.
  - c. Pemkab Langkat belum menerapkan penggolongan dan kodefikasi aset sesuai ketentuan dalam hal ini Permendagri 19 tahun 2016.
  - d. Terdapat aset tanah dan peralatan mesin yang belum dilengkapi bukti kepemilikan.
  - e. Klasifikasi aset tetap tidak tepat.
  - f. Terdapat aset tanah yang belum tercatat
  - g. Terdapat aset peralatan mesin yang dicatat gabungan.

Sedangkan nilai cross loading tertinggi sebesar 0.898 terdapat pada item pernyataan pemusnahan BMD dilakukan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati serta dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pemusnahan, sedang BA pemusnahan dijadikan dasar pengusulan penghapusan BMD. Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dapat dijual, tidak dapat dilakukan tukar menukar, tidak dapat dihibahkan, tidak dapat dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah. Terhadap ketiga alasan untuk dapat dilakukan pemusnahan yaitu tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, maka atas alasan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan adalah bersifat kumulatif yang berarti kedua-duanya harus terpenuhi. Sedangkan atas alasan pemusnahan tidak dapat dipindahtangankan adalah bersifat kumulatif dengan tidak dapat digunakan dan

tidak dapat dimanfaatkan, dan pula dapat bersifat alternatif dengan dengan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan. Data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan antara lain meliputi: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.

Dalam rangka menciptakan pengelolaan BMD yang baik terbitlah Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, dan diharapkan pengelolaan BMD menjadi lebih baik. Cukup banyak BMD yang dikuasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, hal ini dikarenakan penyajian BMD tidak didukung oleh dokumen yang memadai. Atau dapat dikatakan pengelolaan BMD masih kurang baik.

Pengelolaan BMD yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan dalam penyajian di dalam Neraca Pemerintah mempunyai nilai yang sangat signifikan. Dan dalam LHP BPK-RI masalah yang selalu menjadi temuan juga terkait pengelolaan BMD yang kurang dan bahkan tidak memadai.

Syaukat dan Abdul Kohar Irwanto, 2018, dalam penelitiannya menyatakan bahwa lemahnya pengelolaan BMD mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan Chintya Dwi Hadiyani (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan BMD mempunyai kontribusi yang baik dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SmartPLS 3.0 dan pembahasan hasil penelitian dalam bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi atau semakin baik penerapan SAP di setiap SKPD sebagai entitas akuntansi maka kualitas laporan keuangan Pemkab Langkat semakin baik.
2. Kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi atau semakin baik kualitas ASN di setiap SKPD pada Pemkab Langkat maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.
3. Penerapan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapan SPIP di SKPD pada Pemkab Langkat maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.
4. Penguasaan dan pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin canggih atau semakin baik teknologi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan.
5. Pengelolaan BMD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik SKPD dalam mengelola BMD maka semakin baik kualitas laporan keuangan pada Pemkab Langkat.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil simpulan yang diperoleh, maka penulis ingin memberikan saran bagi pihak yang berkepentingan yakni sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemkab Langkat mengembangkan atau meningkatkan kualitas ASN terutama, terkait pengelolaan keuangan agar pengelolaan keuangan semakin baik dan berkualitas melalui pendidikan formal maupun informal. Selain itu dalam penempatan ASN harus sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikannya sehingga laporan keuangan dapat selesai tepat waktu dan berkualitas baik.
2. Pemkab Langkat diharapkan melakukan analisis kebutuhan ASN khususnya untuk kasubbag keuangan selaku PPK SKD harus sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikannya, hal ini penting karena tugas dan fungsi PPK SKPD salah satunya menyusun laporan keuangan SKPD yang nantinya dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemkab. Langkat, sehingga laporan keuangan dapat selesai tepat waktu dan berkualitas baik.
3. Jika dilihat dari LHP BPK atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019 tidak lagi ada temuan terkait penyajian beban persediaan pada LO, oleh karena itu Pemkab Langkat harus tetap konsisten dalam penerapan SAP sehingga temuan BPK tidak terjadi lagi yang menyatakan LO disusun dan disajikan tidak sesuai dengan Lampiran 1 (satu) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun berikutnya serta dapat dibandingkan dengan entitas pelaporan lainnya.

4. Berdasarkan hasil penilaian BPKP terkait penilaian maturitas SPIP, Pemkab Langkat belum mempunyai SPIP yang memadai diantaranya karena SDM Inspektorat belum cukup memiliki kompetensi dan kapabilitas terkait Perencanaan dan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) oleh sebab itu Pemkab Langkat harus lebih meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM melalui workshop/bimbingan teknis/pendidikan pelatihan substantif mengenai PPBR.
5. Terkait penerapan SPIP Pemkab Langkat juga harus lebih serius dalam pemantauan penerapan SPIP dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga apabila ditemukan kelemahan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sehingga tidak menjadi temuan BPK yang berulang setiap tahun anggaran.
6. Sebaiknya Pemkab Langkat lebih meningkatkan kemampuan ASN terutama terkait penggunaan dan pemanfaatan TI, khususnya pemanfaatan TI dalam pengelolaan keuangan antara lain dengan melaksanakan bimbingan dan pelatihan terkait aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan sehingga upaya penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas dapat tercapai.
7. Sebaiknya SKPD di lingkungan Pemkab Langkat lebih serius dalam pengelolaan BMD baik itu pengelolaan persediaan maupun pengelolaan aset tetap sehingga temuan BPK tidak terulang kembali serta dapat menghasilkan pengelolaan BMD yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, N., Bahagia, R., Lubis, A. A., & Siswadi, Y. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Medan: Perdana Publishing.
- Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukit Tinggi). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Aryani, F. (2013). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II. *Tesis, Universita*.
- Bastian, I. (2006). *Audit Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Beest, F. V. (2009AD). Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics. *Nijmegen Centre of Economics (NiCE), Institute*.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Djarwanto. (2011). *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Fadzil, Faudziah, H., & Nyoto, H. (2011). Fiscal Decentralization After Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. *Word Review of Business Research*, 1(2).
- Griffin, M. dan. (2013). *Perilaku Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Syukri, A. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2, 1(1).
- Halim. A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall. J.A. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamali. A. Y. (2018). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Buku Seru.
- Herawati dan Susanto. (2009). Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik. *Akuntansi dan Keuangan*, 11(1).

- Horngren, B.H. (2012). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *Standar Profesional Akuntan Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas Wirawan B. dan Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irwan, D. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Tesis, Universitas*.
- Juliandi, A. (2018). *Structural equation model based partial least square (SEM-PLS): Menggunakan SmartPLS*. Batam: Universitas Batam.
- Mahaputra, R. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Gianyar). *Tesis, Universitas*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyani, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Umkm Di Kabupaten Kudus. *Unisnu Jepara, 11(2)*, 137–150.
- Nuning Pusva Yunita. (2008). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pendapatan Dan Penerimaan Kas Pada Hotel Purnama Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis, 14(3)*.
- Nunnally. (1978). *Psychometric Theory, Second Edition*. New Delhi: Tata Mc.Grawhill Inc.
- Pakpahan, Y. E. (2020). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Umkm Dengan Kompetensi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan, 4(6)*, 346–350.
- Renyowijoyo, M. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sagara, Y. (2015). The Effet of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Fiancial Reporting. Research. *Journal of Finance and Accounting, 6(10)*.
- Saragih. F. (2007). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU, 8(1)*.

- Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, 1*(8).
- Sedarmayanti. (2012). *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*. Bandung: PT. Radika Aditam.
- Silviana. (2012). Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Perkembangan Peran Akuntansi dalam Bisnis yang Profesional. Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis, 3*(2).
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota Semarang). *Tesis, Undip*.
- Sumarsono, S. (2003). *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwanto, Priansyah, & Juni, D. (2011). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab. Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis, 14*(2).
- Tandi, V. P., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Profitabilitas Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013 – 2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 6*(2), 629–637.
- Tangkilisan, H. N. S. (2010). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Offset YPAPI.
- Tobari. (2014). *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Urban, G.-U. C. (n.d.). Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. *Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD*.

Wansyah, H., Darwin, & Bakar, U. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD Pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).

Warren. C.S. (2009). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Widjajanto. N. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Yani. A. (2009). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera). *Tesis, Universitas*.

Yuliani, S., Nadirsyah ^ Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3(2).

..... 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

..... 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang *Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaaan Keuangan*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

## Lampiran I

### KUESIONER PENELITIAN

Stabat,

2021

Hal : Bantuan Mengisi Kuesioner

Lampiran : 8 (Delapan) halaman

**Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu PPK SKPD, Pembantu PPK,  
Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengurus  
Barang dan Auditor Intern Pemerintah  
Kabupaten Langkat  
di-  
Tempat**

Dengan hormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk mengisi kuesioner ini. Sebagai salam hormat, perkenankan saya memperkenalkan diri :

Nama : Heri Susanto  
NPM : 1920050003  
Program : Magister Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pada saat ini akan menyelesaikan pendidikan Strata (S-2) Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tersebut, maka pada saat ini saya sedang melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Langkat, dengan judul : **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Langkat”**.

Saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian yang terlampir. Demikian saya sampaikan, atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/I dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Heri Susanto  
NPM. 1920050003

## Lampiran I

### A. Identitas Responden.

- Nama SKPD : .....
- Nama Responden : .....
- Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
- Tanggal Pengisian : .....
1. Pendidikan Terakhir :  SLTA/Sederajat  
 Diploma (D3), Jurusan :.....  
 Strata 1 (Sarjana), Jurusan:.....  
 Strata 2 (Master), Jurusan:.....
2. Jabatan :  PPK SKPD  
 Pembantu PPK  
 Bendahara SKPD  
 Pembantu Bendahara SKPD  
 Pengurus Barang SKPD  
 Auditor Intern Pemerintah  
 Lainnya, Sebutkan .....
3. Pangkat/Golongan :  Golongan II  
 Golongan III  
 Golongan IV
4. Lama Bekerja : ..... tahun

### B. Petunjuk Pengisian

- Sebelum menjawab pernyataan dimohonkan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi identitas responden terlebih dahulu sesuai formulir isian yang disediakan.
- Memohon kepada Bapak dan Ibu memberikan penilaian terhadap pernyataan yang telah tersedia. Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda (✓) di salah satu kolom yang tersedia, dengan alternatif jawaban sebagai berikut :

a. 1. TB : Tidak Baik 2. KB : Kurang Baik 3. CB : Cukup Baik 4. B : Baik 5. SB : Sangat Baik	c. 1. TM : Tidak Memadai 2. KM : Kurang Memadai 3. CM : Cukup Memadai 4. M : Memadai 5. SM : Sangat Memadai
b. 1. TP : Tidak Pernah 2. JR : Jarang 3. KK : Kadang Kadang 4. S : Sering 5. SS : Sangat Sering	

## Lampiran I

### 1. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TB	KB	CB	B	SB
<b>I. Kualitas Laporan Keuangan</b>						
<b>A. Relevan</b>						
1	Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
2	Laporan keuangan disusun dan disajikan secara lengkap dan tepat waktu, dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini, mengevaluasi keputusan penggunaan dimasa lalu serta dapat digunakan untuk memperkirakan aktivitas keuangan pada periode berikutnya.					
<b>B. Andal</b>						
3	Informasi dalam laporan keuangan telah menggambarkan seluruh transaksi dan peristiwa lainnya secara jujur dan wajar, dapat diuji, serta bila dilakukan pengujian oleh pihak lain akan menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda.					
4	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang sifatnya material.					
5	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan semua pengguna laporan dan tidak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pihak tertentu.					
<b>C. Dapat Dibandingkan</b>						
6	Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya					
<b>D. Dapat Dipahami</b>						
7	Laporan Keuangan disusun secara sistematis dan dengan istilah yang mudah dimengerti, sehingga mudah dipahami oleh pengguna.					

### 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP(X1)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TP	JR	KK	S	SS
<b>II. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</b>						
<b>A. Basis Akuntansi Yang digunakan</b>						
1	Laporan Keuangan Pemkab Langkat disusun dan disajikan berdasarkan SAP dan tertuang dalam Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemda.					
2	Pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual sedangkan pengakuan pendapatan-Lra, belanja dan pembiayaan menggunakan serta basis kas.					

## Lampiran I

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TP	JR	KK	S	SS
<b>B. Komponen Laporan Keuangan</b>						
3	Anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA), disusun berdasarkan basis kas.					
4	Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan Belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.					
5	Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.					
6	Laporan Operasional (LO) disusun untuk mengetahui kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.					
7	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.					
8	Neraca mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dan disajikan dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya.					
9	Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan dan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.					
<b>C. Periode Pelaporan</b>						
10	Laporan keuangan sekurang-kurangnya disusun dan disajikan sekali dalam satu tahun.					

### 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (X2).

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TM	KM	CM	M	SM
<b>III. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>						
<b>A. Pendidikan</b>						
1	Saya memiliki latarbelakang pendidikan akuntansi, minimal D3 akuntansi.					
2	Saya cukup memahami SAP, serta memahami siklus akuntansi.					
<b>B. Pelatihan</b>						
3	Saya telah mendapatkan bimbingan dan pelatihan, baik terkait pengelolaan keuangan daerah secara umum maupun pelatihan khusus terkait akuntansi pemerintahan.					
4	Materi bimbingan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan mendukung tugas saya, setelah mengikuti bimbingan dan pelatihan saya mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.					

## Lampiran I

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TM	KM	CM	M	SM
<b>C.</b>	<b>Pengalaman</b>					
5	Saya memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya bidang akuntansi sehingga membantu saya dalam melaksanakan tugas terutama dapat mengurangi kesalahan dalam menjalankan proses akuntansi.					

### 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP (X3)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TB	KB	CB	B	SB
<b>IV.</b>	<b>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>					
<b>A.</b>	<b>Lingkungan pengendalian</b>					
1	Pimpinan telah menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai serta menyusun standar kompetensi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.					
2	Pimpinan selalu mempertimbangkan resiko dalam setiap pengambilan keputusan.					
3	Dalam pendelegasian wewenang, pimpinan memperhatikan tugas dan fungsi serta batasan tanggungjawabnya.					
<b>B.</b>	<b>Penilaian Resiko</b>					
4	Pimpinan menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko baik yang berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal.					
5	Pimpinan telah melakukan analisis resiko secara lengkap dan menyeluruh untuk mengetahui kemungkinan pelanggaran dan apa dampaknya.					
<b>C.</b>	<b>Kegiatan Pengendalian</b>					
6	Kebijakan dan prosedur pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.					
7	Pimpinan melakukan evaluasi secara teratur guna memastikan setiap kegiatan sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.					
<b>D.</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>					
8	Pimpinan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang ada.					
9	Sistem informasi telah digunakan dan terus dikembangkan guna pengelolaan informasi yang lebih baik.					
<b>E.</b>	<b>Pemantauan</b>					
10	Pimpinan melakukan pemantauan secara berkelanjutan, evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian intern dan jika ditemukan kelemahan diteliti lebih lanjut dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.					

## Lampiran I

### 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi/TI (X4).

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TP	JR	KK	S	SS
<b>V.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)</b>					
<b>A.</b>	<b>Pemanfaatan Komputer (Hardware dan Software)</b>					
1	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan telah didukung oleh penggunaan komputer.					
2	Pelaksanaan siklus akuntansi dari awal transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
3	Terdapat anggaran pemeliharaan dan jadwal pemeliharaan diatur rutin secara berkala.					
4	Pengolahan data transaksi keuangan telah menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
<b>B.</b>	<b>Jaringan dan Komunikasi</b>					
5	Jaringan internet terhubung dengan setiap unit kerja yang ada, dan dijadikan sarana untuk mengirimkan data` dan informasi yang dibutuhkan.					
6	Laporan akuntansi telah dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					

### 6. Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD (X5).

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TP	JR	KK	S	SS
<b>VI.</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)</b>					
<b>A.</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran</b>					
1	Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.					
2	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) disusun setiap tahun dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.					
<b>B.</b>	<b>Pengadaan</b>					
3	Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dan hasilnya dilaporkan kepada pengelola BMD untuk ditetapkan status penggunaannya.					
4	Laporan hasil pengadaan BMD di laporkan baik secara bulanan, semesteran dan tahunan.					
<b>C.</b>	<b>Penggunaan</b>					
5	Penetapan status penggunaan BMD dilaksanakan secara tahunan, dan tidak dilakukan terhadap persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), barang yang akan dihibahkan, dan Aset Tetap Renovasi (ATR).					
6	Pengalihan status penggunaan BMD ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang berdasarkan persetujuan atau keputusan Bupati					

## Lampiran I

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TP	JR	KK	S	SS
<b>D. Pemanfaatan</b>						
7	Pemanfaatan BMD selalu berdasarkan persetujuan Bupati ataupun persetujuan Pengelola Barang.					
8	Pendapatan dari Pemanfaatan BMD untuk pelayanan umum sesuai fungsi BLUD disetorkan ke Kas BLUD dan <b>selain</b> untuk penyelenggaraan sesuai dengan fungsi BLUD disetorkan ke RKUD.					
<b>E. Pengamanan dan Pemeliharaan</b>						
9	Pengamanan yang dilakukan terhadap BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.					
10	Pengguna barang menyusun laporan pemeliharaan secara berkala setiap enam bulan/per semesteran serta melaporkan kepada pengelola barang.					
<b>F. Penilaian</b>						
11	Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemda, pemanfaatan atau pemindahtanganan dan berpedoman pada SAP.					
12	Penilaian kembali BMD (revaluasi) dalam rangka pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan berpedoman pada SAP dan penilaiannya menggunakan standar penilaian.					
<b>G. Pemindahtanganan</b>						
13	Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar kecuali pemindahtanganan dalam bentuk hibah.					
14	Pemindahtanganan BMD dilakukan setelah mendapat persetujuan, baik persetujuan Bupati atau pun persetujuan DPRD.					
15	Pemindahtanganan BMD dalam bentuk Penyertaan Modal pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).					
<b>H. Pemusnahan</b>						
16	Pemusnahan BMD dilakukan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati serta dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pemusnahan, sedang BA pemusnahan dijadikan dasar pengusulan penghapusan BMD.					
<b>I. Penghapusan</b>						
17	Penghapusan BMD dilakukan setelah disetujui oleh Bupati untuk kemudian diterbitkan Keputusan penghapusan oleh Bupati.					
<b>J. Penatausahaan</b>						
18	Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.					

## Lampiran I

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		TP	JR	KK	S	SS
19	Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.					
<b>K.</b>	<b>Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian</b>					
20	Bupati melakukan pembinaan pengelolaan BMD dengan menetapkan Perda tentang pengelolaan BMD.					
21	Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD dan jika ditemukan pelanggaran dapat meminta aparat pengawas intern untuk melakukan audit.					

## Lampiran II

### Tabulasi Data Penelitian

#### A. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7
1	5	5	5	5	5	5	5
2	1	2	2	2	2	3	3
3	5	5	5	5	3	4	3
4	4	3	4	3	3	2	4
5	3	3	3	4	4	3	3
6	4	5	3	5	3	5	4
7	5	5	5	5	5	5	5
8	3	3	3	3	3	3	3
9	4	3	2	3	4	3	3
10	5	4	4	3	3	3	3
11	4	4	4	4	4	4	4
12	3	3	5	5	3	4	4
13	5	5	5	5	5	5	5
14	4	3	1	5	1	4	5
15	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	5	5
17	5	5	5	5	5	5	5
18	3	3	3	4	4	3	3
19	5	5	5	5	5	5	5
20	5	4	3	4	4	4	5
21	5	4	4	4	4	4	4
22	5	5	4	4	4	3	4
23	4	4	4	4	4	4	4
24	5	5	5	5	5	5	5
25	4	4	4	3	5	4	4
26	2	2	2	5	4	2	2
27	2	2	1	4	3	2	2
28	3	3	3	2	2	2	3
29	5	5	5	4	4	4	5
30	1	4	2	4	4	4	4
31	4	3	3	4	3	2	2
32	4	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	4	4	4	5
34	1	1	2	2	1	1	3
35	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	5	5	3	5
37	5	4	3	2	1	5	4
38	3	4	4	4	3	3	4
39	4	4	4	5	3	4	3
40	2	3	2	4	4	5	3

## Lampiran II

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7
41	3	3	4	4	4	3	4
42	5	4	4	3	5	4	5
43	4	4	5	4	4	4	4
44	3	4	3	5	3	3	5
45	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	5	5	5	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	3	4
49	3	4	3	3	3	3	3
50	3	4	3	5	4	3	3
51	2	2	2	2	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3	3
53	3	4	3	4	3	5	5
54	5	4	3	5	5	5	5
55	4	3	4	5	4	3	5
56	2	2	2	2	3	3	3
57	5	5	5	5	5	5	5
58	5	5	5	5	5	5	5
59	5	4	3	5	5	5	5
60	2	2	2	2	3	3	3
61	1	3	2	2	2	2	2
62	3	3	4	3	3	3	3
63	3	4	3	4	3	5	5
64	1	4	2	4	4	4	4
65	4	4	5	5	4	4	4
66	3	3	3	5	3	5	5
67	2	2	2	1	3	3	3
68	4	4	5	4	4	4	4
69	3	4	4	3	3	4	3
70	4	4	4	5	3	3	4
71	3	3	3	5	3	3	3
72	4	4	4	5	3	4	3
73	5	5	5	5	5	5	5
74	5	5	5	5	5	5	5
75	2	2	2	2	3	3	3
76	4	3	3	3	3	3	3
77	4	4	4	5	4	4	4
78	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	5	5	5
80	4	4	4	5	5	5	5
81	4	4	4	4	4	4	4
82	5	4	4	4	5	5	5
83	4	4	4	4	5	5	5
84	4	4	4	5	5	4	4

## Lampiran II

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7
85	4	4	4	5	4	4	4
86	5	4	4	5	4	4	4
87	5	5	5	5	5	5	5
88	5	4	4	4	4	4	4
89	5	5	5	5	5	4	4
90	5	5	5	5	5	4	5
91	4	4	4	4	4	5	4
92	5	4	5	4	5	4	3
93	5	4	5	4	5	3	3
94	4	3	4	3	4	3	4
95	5	5	5	5	4	5	5
96	4	4	4	5	4	4	4
97	4	3	3	3	4	4	3
98	4	5	5	4	5	4	4



## Lampiran II

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
45	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
47	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	3	3	5	3	4	4	5	4	4	5
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	1	5	4	4	4	4	5	3	5	5
54	4	3	4	4	4	3	3	3	2	5
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
57	4	5	4	4	5	5	4	3	5	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
61	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5
62	4	3	3	4	4	4	5	4	3	3
63	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5
64	3	5	2	3	4	2	3	3	2	2
65	3	4	3	2	4	3	3	3	5	5
66	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
68	4	5	5	5	5	3	4	5	4	5
69	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5
70	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
71	3	5	4	5	5	4	3	2	4	4
72	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5
73	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
74	5	5	4	5	4	3	3	3	3	5
75	4	5	3	4	5	4	5	5	5	5
76	3	5	3	3	4	4	4	4	5	4
77	4	5	3	2	4	2	2	1	2	2
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	2	4	3	1	5	3	4	3	4	4
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
81	4	5	5	4	5	4	4	5	5	3
82	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4
83	3	5	4	5	5	5	5	5	3	4
84	5	5	3	5	3	4	4	4	4	5
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	5	4	3	5	5	5	5	5	2	5
87	3	5	4	4	4	4	5	5	4	4
88	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
89	2	4	4	4	5	1	2	3	3	4

## Lampiran II

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
91	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4
92	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5
93	2	5	3	5	5	3	3	4	3	2
94	5	4	4	5	4	4	4	3	4	5
95	4	5	4	3	3	3	4	5	5	5
96	5	5	5	2	5	5	5	5	1	5
97	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5
98	4	5	3	5	5	3	3	5	2	5

## Lampiran II

### C. Sumber Daya Manusia (X2)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
1	3	3	4	3	4
2	5	4	3	3	4
3	5	5	5	5	3
4	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5
6	3	4	4	3	3
7	4	4	4	5	4
8	5	5	5	5	5
9	5	4	4	4	4
10	5	5	5	5	5
11	5	4	4	4	4
12	5	5	5	5	5
13	5	5	4	5	5
14	4	3	4	4	4
15	4	4	5	5	5
16	5	5	5	5	4
17	3	5	5	5	5
18	5	5	5	5	5
19	5	5	5	5	5
20	5	3	3	3	3
21	4	5	4	5	4
22	4	3	3	4	3
23	3	4	3	4	4
24	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5
26	5	5	1	2	5
27	5	5	5	4	4
28	4	4	4	3	4
29	5	5	4	5	4
30	5	4	5	5	4
31	4	5	4	3	4
32	3	3	3	3	3
33	4	5	5	5	5
34	5	4	5	5	4
35	4	3	3	3	3
36	5	3	3	4	3
37	3	5	4	4	3
38	5	5	5	5	5
39	5	5	5	5	5
40	5	5	5	5	5
41	5	5	5	5	5
42	3	2	1	2	1

## Lampiran II

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
43	5	5	5	5	5
44	5	5	5	5	5
45	5	5	5	5	5
46	5	3	4	4	4
47	4	3	3	3	3
48	5	5	5	5	5
49	4	3	5	4	3
50	3	3	3	3	3
51	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4
53	5	5	4	4	3
54	5	5	5	4	5
55	5	4	4	5	5
56	5	5	5	5	5
57	5	3	4	3	3
58	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	5
60	2	2	2	2	2
61	5	5	4	4	4
62	4	4	4	4	4
63	5	5	5	5	5
64	5	3	3	3	4
65	5	5	5	5	5
66	5	5	5	4	4
67	5	5	5	5	5
68	5	4	5	5	5
69	5	5	5	5	5
70	5	5	5	5	5
71	4	5	4	3	4
72	5	4	4	4	5
73	5	5	5	5	5
74	5	4	5	3	3
75	5	5	5	5	5
76	5	4	5	5	4
77	3	3	3	4	3
78	5	5	5	5	5
79	5	5	5	5	5
80	5	5	5	5	5
81	5	5	4	4	3
82	3	4	4	2	4
83	5	3	4	4	4
84	4	3	4	3	3
85	3	3	3	3	3
86	2	4	5	5	5

## Lampiran II

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
87	5	5	5	4	4
88	5	5	5	5	5
89	1	1	5	2	3
90	5	5	5	4	4
91	4	3	4	3	4
92	5	5	5	5	5
93	3	2	3	4	4
94	5	4	4	5	4
95	5	3	3	3	3
96	5	5	5	5	4
97	4	5	5	4	4
98	5	4	5	3	4

## Lampiran II

### D. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP (X3)

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10
1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	5
2	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4
3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4
6	4	5	4	4	3	4	4	3	4	2
7	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	3	4	4	3	4	3	5	5	4	3
12	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
13	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
21	3	4	3	5	3	2	4	4	3	5
22	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
23	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
24	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	3	3	5	4	4	3	3	3	5	5
27	4	5	4	3	4	4	4	5	5	5
28	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4
29	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	2	2	1	2	5	4	4	5	4	4
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3
36	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
37	3	3	4	3	4	3	5	3	4	5
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
42	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1

## Lampiran II

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	3	4	4	3	5	2	4	4	4	4
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	5	5	3	2	4	5	3	4	2	5
54	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
57	4	4	5	4	4	4	3	5	5	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3
61	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5
62	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
63	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
64	3	3	3	4	2	3	3	3	4	4
65	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5
66	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
68	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
70	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
71	5	5	4	5	4	3	4	4	5	5
72	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
73	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
74	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
76	5	5	4	5	5	4	3	5	5	4
77	2	4	3	3	4	4	4	4	3	3
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
81	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3
82	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5
83	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
84	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	5	5	5	5	5	5	3	4	2	5

## Lampiran II

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10
87	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
89	4	2	4	2	3	4	2	3	3	3
90	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5
91	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
93	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4
94	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
95	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3
96	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
98	4	4	3	3	4	4	4	4	2	3

## Lampiran II

### E. Pemanfaatan Teknologi Informasi/TI (X4)

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6
1	5	5	5	3	5	5
2	4	5	4	4	3	3
3	1	2	2	1	1	1
4	5	5	5	5	4	5
5	4	5	4	4	5	4
6	2	3	4	3	4	2
7	5	4	4	5	4	5
8	5	5	5	5	5	5
9	4	4	4	4	4	4
10	5	5	5	5	5	5
11	4	5	5	4	5	5
12	5	4	4	4	4	4
13	4	5	4	5	5	5
14	4	4	4	3	2	4
15	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	5
17	5	5	5	5	3	3
18	5	5	5	5	5	5
19	4	5	5	5	5	5
20	4	4	4	3	4	3
21	3	2	2	3	5	4
22	4	3	4	3	3	4
23	4	4	4	3	5	3
24	3	3	3	4	3	3
25	5	5	5	5	5	5
26	3	3	5	5	1	4
27	5	5	5	5	5	5
28	3	5	4	4	3	3
29	3	4	5	3	5	4
30	4	5	4	4	4	4
31	4	4	3	4	4	4
32	4	4	3	3	4	3
33	5	5	5	5	5	5
34	4	5	4	4	4	4
35	3	4	3	4	4	4
36	3	4	3	4	4	3
37	5	5	5	5	5	5
38	5	5	5	5	5	5
39	5	5	5	5	5	5
40	5	5	5	5	5	5
41	5	5	5	5	5	5
42	1	1	3	1	1	1

## Lampiran II

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6
43	5	5	5	5	5	5
44	5	5	5	5	5	5
45	5	5	5	5	5	5
46	4	4	4	4	4	5
47	3	4	3	3	3	3
48	5	5	5	5	5	5
49	5	5	3	2	1	2
50	3	3	3	3	3	3
51	5	5	5	5	5	5
52	4	4	4	4	4	4
53	3	4	5	5	5	3
54	5	5	3	4	4	4
55	5	5	5	5	5	5
56	5	5	5	5	5	5
57	4	4	4	4	4	3
58	5	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	5	5
60	3	3	3	3	3	3
61	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4
63	4	5	4	5	5	5
64	3	3	2	4	5	3
65	5	5	3	4	4	4
66	5	4	5	5	5	4
67	5	5	5	5	5	5
68	5	5	3	3	3	5
69	5	5	5	5	5	5
70	5	5	3	3	3	5
71	4	5	3	4	3	3
72	5	5	5	5	5	4
73	5	5	5	5	5	5
74	3	5	5	3	3	5
75	5	5	5	5	4	5
76	5	4	4	3	4	3
77	3	3	2	2	2	3
78	5	5	5	5	5	5
79	5	5	5	5	5	5
80	5	5	5	5	5	5
81	3	5	3	3	3	4
82	5	5	5	5	5	4
83	5	5	5	4	4	5
84	3	3	4	3	3	4
85	3	3	3	3	3	3
86	5	5	5	5	1	4
87	4	4	5	4	4	5

## Lampiran II

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6
88	5	5	5	5	5	5
89	4	2	4	3	4	5
90	4	4	5	5	5	4
91	4	3	4	5	4	5
92	5	5	5	5	5	5
93	4	5	4	4	4	4
94	5	4	3	4	3	4
95	3	3	3	3	3	3
96	5	5	5	5	5	5
97	4	5	5	5	4	5
98	4	4	4	4	4	4





## Lampiran II

No	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5.7	X5.8	X5.9	X5.10
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
89	1	4	3	4	3	5	4	3	5	4
90	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
91	4	5	3	4	4	5	4	3	5	4
92	5	4	4	4	5	3	4	5	5	5
93	4	3	3	3	3	2	3	4	4	5
94	4	3	3	5	4	3	2	3	5	4
95	4	5	5	2	3	2	3	3	3	3
96	5	1	5	1	5	2	2	5	5	5
97	5	5	5	4	3	4	5	5	5	5
98	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2

## Lampiran II

### G. Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD (X5) X5.11 s.d X5.21

No	X5.11	X5.12	X5.13	X5.14	X5.15	X5.16	X5.17	X5.18	X5.19	X5.20	X5.21
1	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
2	4	4	4	5	4	3	3	3	3	3	2
3	1	2	1	1	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	3	4	3	4	2	3	4	3
5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	4	2	4	4	3	4	5	4	2	1
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	5	5	5	5	2	4	3	4	3	3	3
9	3	4	4	4	4	3	3	3	5	4	4
10	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4
11	5	5	4	4	5	3	4	4	4	4	3
12	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3
13	4	4	4	3	5	3	5	5	5	4	4
14	4	3	4	2	3	2	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	2	3	5	5	5	3
16	5	5	5	2	5	5	5	5	3	4	3
17	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4
19	4	4	4	4	5	4	5	2	5	5	5
20	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
21	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
22	3	4	4	2	5	5	4	5	4	4	4
23	5	5	4	2	4	3	4	4	4	4	5
24	3	4	3	3	5	4	5	5	4	5	5
25	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	3
26	5	5	5	1	3	3	2	4	2	4	1
27	4	4	4	3	1	3	2	3	4	2	1
28	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	2
29	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5	4
30	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	3
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5
34	4	4	4	3	2	3	2	1	1	3	3
35	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
36	3	3	3	3	5	3	5	5	5	5	3
37	5	5	2	2	4	4	3	3	3	4	5
38	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3
39	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3
42	3	1	1	2	4	3	4	3	4	4	5
43	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4



## Lampiran II

No	X5.11	X5.12	X5.13	X5.14	X5.15	X5.16	X5.17	X5.18	X5.19	X5.20	X5.21
88	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4
89	5	2	4	1	4	4	4	4	4	4	3
90	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	3	4	4	5	5	4	5	5
92	5	5	5	1	4	4	4	3	4	4	4
93	4	4	3	2	5	5	4	4	4	4	4
94	4	3	4	2	4	5	4	3	4	4	4
95	2	3	3	3	4	5	5	5	5	4	4
96	5	2	4	2	4	3	4	4	4	5	3
97	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	4
98	4	4	3	3	5	5	5	4	5	4	5

### Lampiran III

#### Uji Validitas Nilai Cross Loading

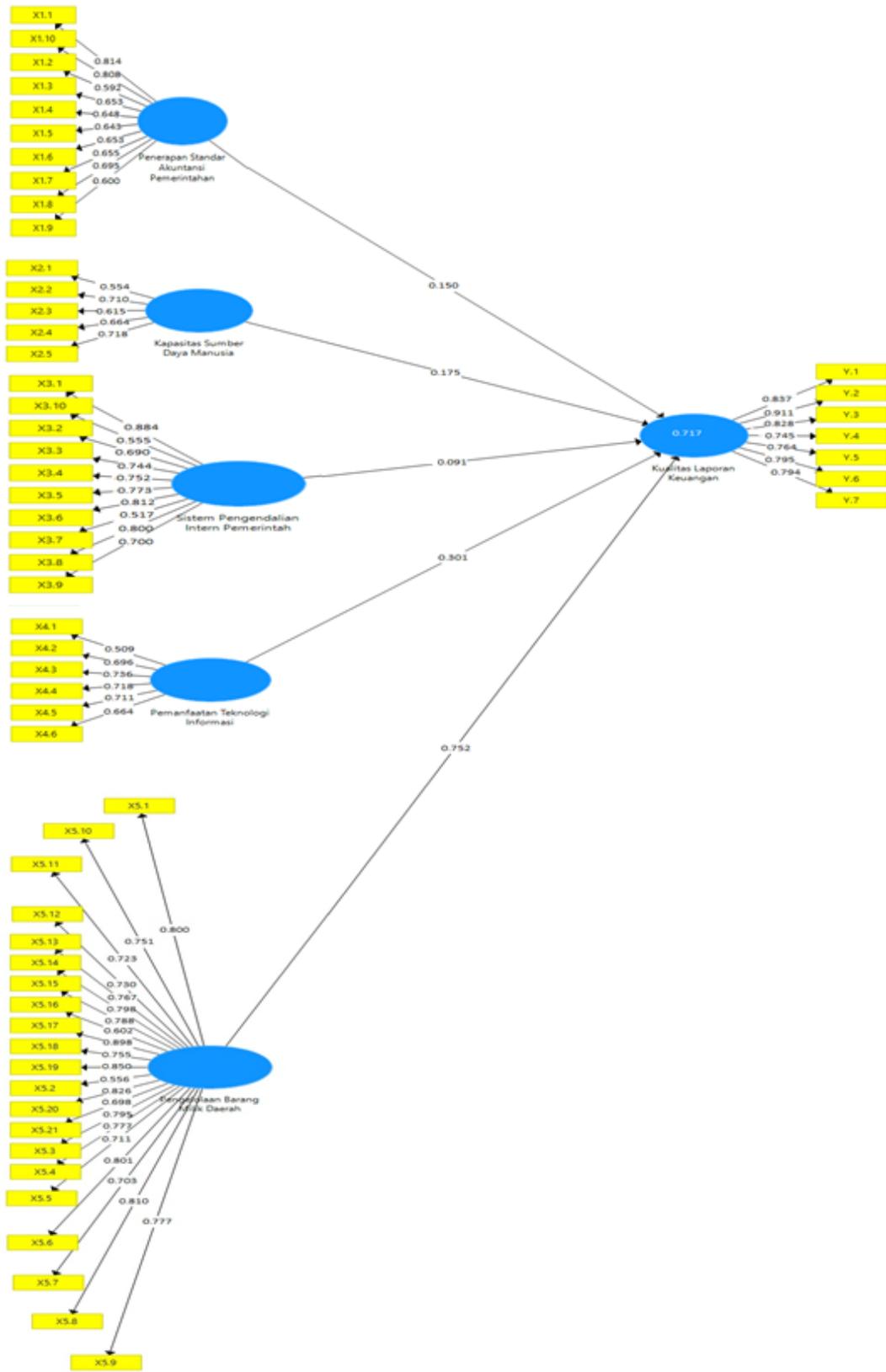
	<b>Penerapan SAP</b>	<b>Kapasitas SDM</b>	<b>SPIP</b>	<b>Pemanfaatan TI</b>	<b>Pengelolaan BMD</b>	<b>Kualitas Laporan keuangan</b>
X1.1	0,814	0,676	0,640	0,667	0,538	0,493
X1.10	0,808	0,635	0,657	0,587	0,647	0,570
X1.2	0,592	0,437	0,545	0,420	0,562	0,470
X1.3	0,653	0,639	0,619	0,647	0,451	0,607
X1.4	0,648	0,566	0,582	0,622	0,580	0,551
X1.5	0,643	0,504	0,549	0,591	0,472	0,467
X1.6	0,653	0,650	0,594	0,357	0,362	0,611
X1.7	0,655	0,617	0,616	0,550	0,497	0,498
X1.8	0,695	0,546	0,676	0,640	0,667	0,664
X1.9	0,600	0,560	0,488	0,233	0,139	0,133
X2.1	0,049	0,554	0,491	0,018	0,193	0,312
X2.2	0,053	0,710	0,143	0,178	0,190	0,272
X2.3	0,276	0,615	0,151	0,234	0,139	0,077
X2.4	0,364	0,664	0,613	0,598	0,538	0,493
X2.5	0,615	0,718	0,645	0,677	0,547	0,570
X3.1	0,653	0,548	0,884	0,562	0,522	0,515
X3.2	0,305	0,305	0,690	0,530	0,349	0,355
X3.3	0,621	0,614	0,744	0,272	0,416	0,437
X3.4	0,562	0,716	0,752	0,416	0,488	0,233
X3.5	0,648	0,761	0,773	0,481	0,606	0,647
X3.6	0,585	0,736	0,812	0,416	0,295	0,736
X3.7	0,476	0,402	0,517	0,403	0,233	0,478
X3.8	0,611	0,619	0,800	0,189	0,132	0,253
X3.9	0,485	0,612	0,700	0,370	0,105	0,632
X3.10	0,465	0,522	0,555	0,412	0,491	0,082
X4.1	0,474	0,487	0,429	0,509	0,447	0,044
X4.2	0,587	0,070	0,487	0,696	0,640	0,509
X4.3	0,502	0,565	0,493	0,736	0,485	0,52
X4.4	0,609	0,512	0,570	0,718	0,565	0,559
X4.5	0,664	0,529	0,470	0,711	0,588	0,562
X4.6	0,658	0,562	0,597	0,664	0,574	0,584
X5.1	0,649	0,530	0,551	0,538	0,800	0,653
X5.2	0,453	0,272	0,467	0,447	0,556	0,405
X5.3	0,548	0,416	0,611	0,562	0,795	0,621
X5.4	0,624	0,481	0,498	0,451	0,777	0,562
X5.5	0,447	0,416	0,664	0,580	0,711	0,648
X5.6	0,746	0,503	0,312	0,472	0,801	0,585
X5.7	0,498	0,424	0,272	0,662	0,703	0,676
X5.8	0,617	0,569	0,077	0,497	0,810	0,611
X5.9	0,773	0,522	0,493	0,667	0,777	0,485
X5.10	0,706	0,449	0,570	0,193	0,751	0,565

### Lampiran III

	<b>Penerapan SAP</b>	<b>Kapasitas SDM</b>	<b>SPIP</b>	<b>Pemanfaatan TI</b>	<b>Pengelolaan BMD</b>	<b>Kualitas Laporan keuangan</b>
X5.11	0,540	0,416	0,515	0,190	0,723	0,588
X5.12	0,560	0,488	0,233	0,139	0,730	0,674
X5.13	0,730	0,606	0,647	0,538	0,767	0,502
X5.14	0,513	0,295	0,736	0,547	0,798	0,609
X5.15	0,627	0,233	0,578	0,522	0,788	0,664
X5.16	0,501	0,248	0,253	0,549	0,602	0,558
X5.17	0,522	0,038	0,632	0,416	0,898	0,030
X5.18	0,682	0,015	0,542	0,653	0,775	0,078
X5.19	0,651	0,013	0,565	0,692	0,850	0,031
X5.20	0,607	0,690	0,759	0,489	0,826	0,101
X5.21	0,578	0,502	0,565	0,485	0,698	0,52
Y.1	0,538	0,493	0,688	0,741	0,585	0,837
Y.2	0,647	0,570	0,687	0,768	0,664	0,911
Y.3	0,562	0,470	0,607	0,739	0,746	0,828
Y.4	0,451	0,697	0,664	0,656	0,568	0,745
Y.5	0,580	0,551	0,685	0,811	0,655	0,764
Y.6	0,472	0,467	0,657	0,729	0,666	0,795
Y.7	0,662	0,611	0,625	0,772	0,653	0,794

# Lampiran III

## Uji Validitas Gambar Outer Model



### Lampiran III

#### Uji Reabilitas Nilai Cronbach:s Alpha dan Composite Reability

Variabel	Cronbach Alpha	rho_A	Composite Reliability	(AVE)
Penerapan SAP	0,900	0,885	0,939	0,888
Kapasitas SDM	0,827	0,832	0,888	0,838
SPIP	0,900	0,906	0,921	0,797
Penerapan TI	0,858	0,929	0,924	0,860
Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,894	0,919	0,923	0,706
Kualitas Laporan keuangan	0,913	0,926	0,931	0,660

#### Uji Hipotesis

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,072	0,658	0,148	2,896	0,004
Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	0,134	0,338	0,261	4,574	0,000
SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,071	0,134	0,164	2,888	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi -> Kualitas Laporan Keuangan	0,157	0,014	0,229	4,886	0,000
Pengelolaan Barang Milik Daerah-> Kualitas Laporan Keuangan	0,778	0,115	0,085	14,809	0,000

### Lampiran III

#### R – Square

Variabel	R Square
Kualitas Laporan Keuangan	0.717

Variabel	Coefficient	Coefficient <sup>2</sup>	R
Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,150	0,0225	2,25
Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	0,175	0,030625	3,0625
SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,091	0,008281	0,8281
Pemanfaatan Teknologi Informasi -> Kualitas Laporan Keuangan	0,301	0,090601	9,0601
Pengelolaan Barang Milik Daerah-> Kualitas Laporan Keuangan	0,752	0,565504	56,5504
<b>Total</b>		<b>0,717</b>	<b>71,7</b>

#### F -Square

Variabel	Penerapan SAP	Kualitas Laporan Keuangan	Kapasitas SDM	SPIP	Pemanfaatan TI	Pengelolaan BMD
Penerapan SAP		1.125				
Kapasitas SDM		1.230				
SPIP		1.175				
Pemanfaatan TI		1.311				
Pengelolaan BMD		1.552				

## Lampiran IV

**Tabel Level Maturitas SPIP Pada Pemerintah Daerah**

No.	Tingkat Maturitas	Level	Karakteristik SPIP
1	Belum Ada	0	Pada level ini, sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
2	Rintisan	1	Pada Level ini, sudah ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya
3	Berkembang	2	Pada level ini, Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu Pemerintah. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Kepala Daerah menangani kelemahan tidak konsisten
4	Terdefinisi	3	Pada tingkat ini, Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi
5	Terkelola dan Terukur	4	Pada tingkat ini, Pemerintah Daerah telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. Masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan secara formal dan terdokumentasi. Namun demikian, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi computer
6	Optimum	5	Pada tingkat optimum, Pemerintah Daerah telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021

## Lampiran V

### Data ASN Pada Pemkab Langkat dengan Latarbelakang Pendidikan Akuntansi

No.	SKPD	Pendidikan Akuntansi				Jumlah
		SMK	D3	S1	S2	
1	Dinas Pendidikan	-	1	-	-	1
2	Dinas Kesehatan	1	-	-	1	2
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	1	-	1
5	Dinas Sosial	-	-	-	-	-
6	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	1	-	1
7	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	1	-	1
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1	-	-	1
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	1	-	1
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak	-	-	1	-	1
11	Dinas Perhubungan	-	1	-	-	1
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-
13	Dinas Koperasi	-	-	1	-	1
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	-	-	-	1
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	-	-	-	1
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	2	6	-	8
24	Badan Pendapatan Daerah	-	1	1	-	2
25	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-
27	Sekretariat Daerah	1	2	1	-	4
28	Sekretariat DPRD	-	-	1	-	1
29	Inspektorat	-	-	1	-	1
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura	-	-	-	-	-
31	Satuan Polisi Pamong Praja	1	-	-	-	1
32	Kecamatan Bahorok	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Salapian	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Kuala	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Selesai	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sei Bingai	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Binjai	1	-	1	-	2
38	Kecamatan Stabat	1	1	-	-	2
39	Kecamatan Wampu	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Secangggang	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Hinai	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Tanjung Pura	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Gebang	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Babalan	-	-	-	-	-

## Lampiran V

No.	SKPD	Pendidikan Akuntansi				Jumlah
		SMK	D3	S1	S2	
45	Kecamatan Berandan Barat	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Sei Lapan	-	1	-	-	1
47	Kecamatan Pangkalan Susu	-	-	-	-	-
48	Kecamatan Besitang	-	-	-	-	-
49	Kecamatan Padang Tualang	-	-	-	-	-
50	Kecamatan Sawit Seberang	-	-	-	-	-
51	Kecamatan Batang Serangan	-	-	-	-	-
52	Kecamatan Kutambaru	-	-	-	-	-
53	Kecamatan Pematang Jaya	-	-	-	-	-
54	Kecamatan Sirapit	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>35</b>

Sumber: BKD Kab Langkat (2021)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8)

### SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 820/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2021

Tentang :

#### **PENETAPAN JUDUL TESIS DAN PENGHUNJUKAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sesuai dengan persetujuan judul dan pembimbing tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi UMSU tanggal 05 Juli 2021 dengan ini memutuskan untuk menetapkan Judul Tesis dan Pembimbing :

Nama mahasiswa	: <b>Heri Susanto</b>
NPM	: 1920050003
Prog. Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.
Pembimbing I	: Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA
Pembimbing II	: Dr. Hj. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

Surat Persetujuan Penetapan Judul Tesis dan Pembimbing ini berlaku s.d. tanggal **05 Juli 2022**. Surat Persetujuan ini dianggap batal apabila sampai batas waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesis.

Demikian Surat Persetujuan ini diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal, 24 Dzulkaidah 1442 H  
05 Juli 2021 M



Direktur

**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**  
IDN.0121065801

Tembusan:

1. Ibu Ketua Prodi Maksi UMSU;
2. Yth. Bpk/Ibu Dosen Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa ybs



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)  
E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari ini, tanggal 14 Oktober 2021 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : Heri Susanto  
NPM : 1920050003  
Prog. Studi/Peminatan : Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik  
Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Pembimbing I : Sesuaikan dengan saran penguji
2. Pembimbing II : Sesuaikan dengan saran penguji
3. Penguji I : Tidak ada Perbaikan
4. Penguji II : Tidak ada Perbaikan
5. Penguji III : Perbaiki tekhnis Penulisan dan perbaiki kembali saran

Berita acara ini ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan, 14 Oktober 2021

1. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.,  
Pembimbing I
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si, Ak., CA.,  
Pembimbing II
3. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPAI.,  
Penguji I
4. Dr. Irfan, S.E., M.M.,  
Penguji II
5. Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si.,  
Penguji III

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Heri Susanto
2. Tempat / Tgl. Lahir : Padang Cermin, 25 Juni 1980
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jln. Binjai-Kuala Gg. Ibadah Dusun Beringin  
Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Keluarga :
  - a. Ayah : Surli
  - b. Ibu : Tumiah
  - c. Istri : Evi Gunawan, S.Pd.,
  - d. Anak : - Raisya Dara Artha Susanto  
- Kenzie Muhammad Akhdan Susanto  
- Dzakira Yasmine Noer Susanto
8. Pendidikan Formal :
  - a. Tahun 1987 – 1993 : SDN 050591 Padang Cermin
  - b. Tahun 1993 – 1996 : Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Amal  
Suka Tani Kuala Kab. Langkat
  - c. Tahun 1996 – 1999 : SMU Negeri 1 Kuala Kab. Langkat
  - d. Tahun 1999 – 2003 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sumatera Utara (USU)
  - e. Tahun 2019 – 2021 : Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (UMSU)
9. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat